



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**FIGHT AGAINST
GREEN FINANCIAL CRIMES**

ASEAN INDONESIA
2023

**LAPORAN SEMESTER 1
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
2023**

**SAMBUT
TAHUN POLITIK**

SIAP KAWAL PESTA RAKYAT





SAMBUT TAHUN POLITIK, SIAP KAWAL PESTA RAKYAT

LAPORAN SEMESTER 1 PPAK TAHUN 2023

Diterbitkan oleh:

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Penanggung Jawab: Supriadi (Kepala Pusat Pemberdayaan Kemitraan APUPPT)

Tim Penyusun & Kontributor: Mulyana, Restu Aji Purwoko, Vira Nuraeni, Rizki Maulana, Isro' Kurniawan Rahakbauw, Dandi Riskia, Arya Hendro Yudo, Retno Dwi Larasati, Muhammad Miftah Farid, Arni Cipta Lestari, Diandra Rachel Sianturi, Shanti Dewi Siawanta, Andi Emil Hidayat, Rieke Widarsari

Editor: Ellya Sulistuyani

Desain, Layout dan Perwajahan: Mulyana

Ilustrasi Cover: Irwan Nuswantoro

21x21 cm - xiv,142 halaman

ISSN : 2623-2766

SK Nomor 0005.26232766/JI.3.1/SK.ISSN/2018.09

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Jl. Ir. H. Juanda No. 35 Jakarta Pusat

www.ppatk.go.id

VISI

Mewujudkan stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan Indonesia melalui **pengecahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang guna mewujudkan Indonesia maju** yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong

MISI

- 01.** Meningkatkan **kemanfaatan hasil analisis, hasil pemeriksaan, hasil riset, dan rekomendasi kebijakan** dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dan pendanaan terorisme
- 02.** Meningkatkan **peran serta dan sinergi pemangku kepentingan secara optimal** di lingkup nasional maupun internasional
- 03.** Meningkatkan **keandalan sistem informasi**
- 04.** Meningkatkan **kapabilitas sumber daya anti pencucian uang** serta tata kelola kelembagaan PPATK

TUGAS

01. Mencegah dan Memberantas **Tindak Pidana Pencucian Uang**
02. Mencegah dan Memberantas **Tindak Pidana Pendanaan Terorisme**

FUNGSI

01. Pencegahan dan Pemberantasan **Tindak Pidana Pencucian Uang**
02. **Pengelolaan Data dan Informasi** yang diperoleh PPATK
03. Pengawasan terhadap **Kepatuhan Pihak Pelapor**
04. **Analisis atau Pemeriksaan** laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi Tindak Pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lainnya
05. Pencegahan dan Pemberantasan **Tindak Pidana Pendanaan Terorisme**



Berorientasi Pelayanan

- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat
- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan;
- Melakukan perbaikan tiada henti.

Akuntabel

- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi;
- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

Kompeten

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
- Membantu orang lain belajar;
- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

Harmonis

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
- Suka menolong orang lain;
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

Core Value ASN PPATK BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Loyal

- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah;
- Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara;
- Menjaga rahasia jabatan dan negara.

Adaptif

- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas;
- Bertindak proaktif.

Kolaboratif

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah;
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama.

KATA PIMPINAN

Assalamualaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh,
Salam Sejahtera bagi kita semua,

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kekuatan dan kemampuan kepada Pimpinan dan Staf Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk terus bekerja dan berkarya membawa PPATK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Semester 1 PPATK tahun 2023 diberi tema "Sambut Tahun Politik, Siap Kawal Pesta Rakyat", hal ini diangkat sebagai bentuk kesiapan PPATK dalam menghadapi gelaran tahun politik 2024 dalam mempersiapkan ekosistem politik dan hukum yang berintegritas bersama instansi-instansi terkait. Laporan ini juga merangkum berbagai potret dan capaian PPATK pada periode Januari s.d. Juni 2023. Berbagai capaian tersebut antara lain terkait upaya PPATK dalam menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan nasional diantaranya melalui peran PPATK dalam pengungkapan perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU), *Green Financial Crime*, tindak pidana perdagangan orang, kasus koperasi, narkoba, terorisme, upaya menuju keanggotaan FATF, serta beragam aksi pencegahan TPPU dan TPPT dengan meningkatkan dan memperluas vibrasi PPATK

melalui beragam kegiatan seperti gerakan nasional 21 tahun rezim anti pencucian uang pencegahan pendanaan terorisme, penguatan jejaring kerjasama dan edukasi masyarakat, peningkatan literasi APUPPT, Pendidikan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT), hingga beragam prestasi yang dicapai pada semester satu tahun 2023 seperti keberhasilan PPATK dengan nilai "sangat memuaskan" dalam pengelolaan kearsipan, RAN PE Awards 2023, BKN Awards 2023, Partisipasi dalam Keketuaan ASEAN 2023, hingga penghargaan BAZNAS Award 2023.

Selama Semester 1 ini, PPATK senantiasa menunjukkan kontribusinya dalam upaya peningkatan penerimaan negara dengan menyampaikan Hasil Analisis (HA) dan Hasil Pemeriksaan (HP) ke Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dengan potensi penerimaan negara sebesar **Rp11.611.670.858.370,00**, dengan realisasi penerimaan negara pada semester 1 tahun 2023 ini sebesar Rp2,1 triliun. PPATK juga telah menyampaikan Hasil Analisis, Hasil Pemeriksaan, dan Informasi kepada aparat penegak hukum dan instansi terkait sebanyak 661 laporan selama semester 1 ini dengan indikasi Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Lain atas Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan yang didominasi dengan indikasi tindak pidana korupsi (164), pendanaan terorisme (82),

perpajakan (71), Narkoba (50), penipuan (42), tindak pidana terkait *Green Financial Crime* (19), dan tindak pidana lainnya (83) serta penyampaian informasi terkait proses *fit and proper* sebanyak 150 Informasi ke sejumlah Kementerian dan Lembaga.

PPATK berupaya menumbuhkan semangat pencegahan TPPU dan TPPT di masyarakat bersama seluruh *stakeholder* terkait melalui penyelenggaraan rangkaian Gerakan Nasional 21 tahun Rezim Anti Pencucian Uang Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan kegiatan edukasi publik. Disamping itu, dalam membina pihak pelapor dan *stakeholder*, PPATK juga senantiasa meningkatkan kualitas pelaporan oleh Pihak Pelapor melalui bimbingan teknis dan asistensi, mengingat selama semester 1 ini PPATK telah menerima 16.343.201 laporan melalui aplikasi Go AML. Selain itu Pusat Pendidikan dan Pelatihan APUPPT dalam rangka meningkatkan pemahaman Anti TPPU dan TPPT bagi Aparat Penegak Hukum (APH), telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi APH sebanyak 6 pelatihan dari 28 pelatihan yang diselenggarakan untuk *stakeholder* selama semester 1 ini.

Ucapan terima kasih dan apresiasi PPATK sampaikan kepada Presiden RI dan Dewan Perwakilan Rakyat RI, serta lembaga yang tergabung dalam Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, berikut

seluruh instansi terkait lainnya yang ragam kontribusinya tidak dapat disebutkan satu persatu dalam mendukung kerja PPATK.

Tidak lupa ucapan terima kasih kepada rekan-rekan pers dan masyarakat yang selalu setia mendukung kerja PPATK. Tanpa dukungan besar yang selalu menyertai langkah PPATK, perjuangan PPATK tidak akan ada artinya. Ke depan, segenap capaian yang sudah ditoreh akan menjadi pelecuk semangat seluruh insan PPATK untuk terus meningkatkan semangat dan kualitas kerja demi terwujudnya Indonesia yang bebas dari segala bentuk pencucian uang, pendanaan terorisme, dan segala bentuk kejahatan keuangan lainnya. Dengan bangga kami sampaikan Laporan Semester 1 PPATK 2023. Semoga segenap kerja dan capaian ini bermanfaat bagi bangsa dan negara, sekaligus mendapat ridha dari Allah SWT.

Wassalamu'alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh,

Jakarta, 30 Juni 2023
Kepala PPATK

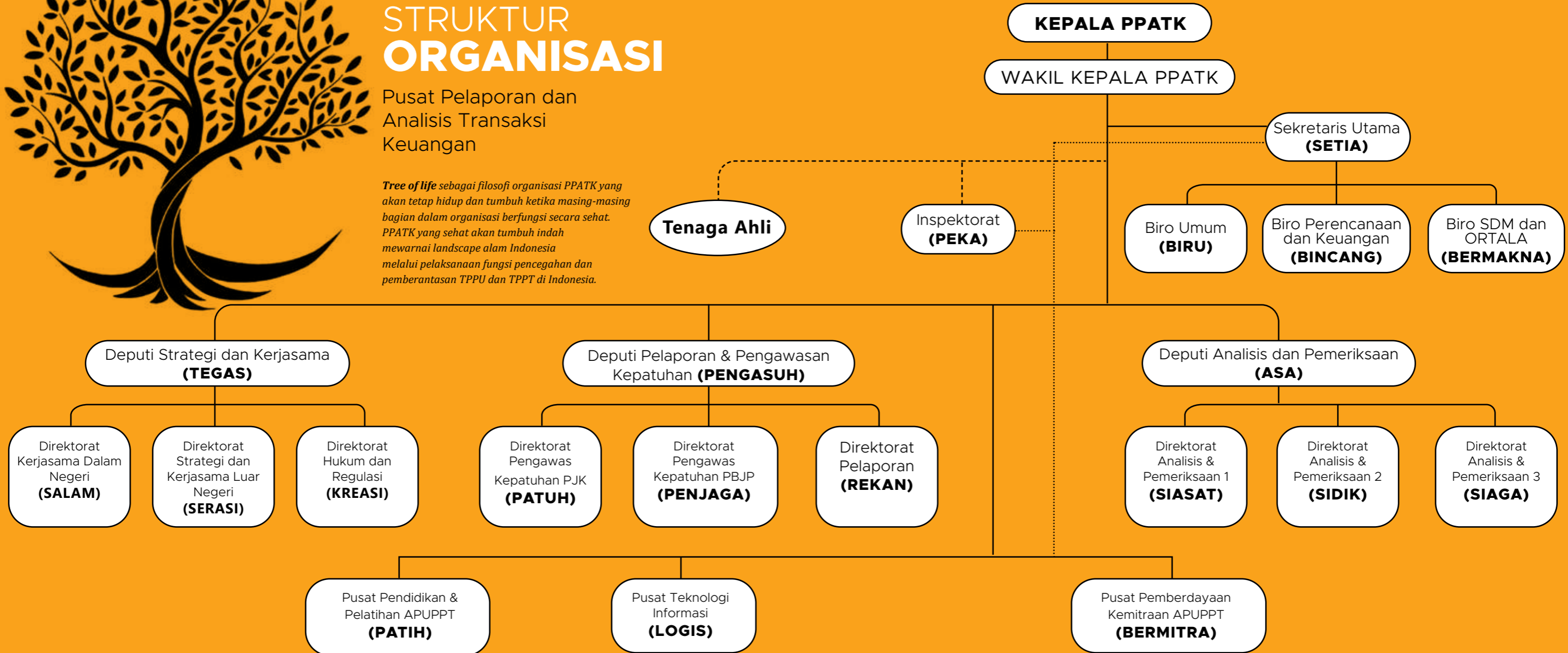
Ivan Yustiayandana



STRUKTUR ORGANISASI

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Tree of life sebagai filosofi organisasi PPATK yang akan tetap hidup dan tumbuh ketika masing-masing bagian dalam organisasi berfungsi secara sehat. PPATK yang sehat akan tumbuh indah mewarnai landscape alam Indonesia melalui pelaksanaan fungsi pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT di Indonesia.



DAFTAR ISI

| | | | | | | | |
|--|-----------|--|-----------|--|-----------|---|------------|
| Visi, Misi, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Nilai Dasar PPATK..... | iv | Rapat Koordinasi Tahunan PPATK Tahun 2023..... | 30 | Koordinasi dan Asistensi Penanganan Perkara Dugaan TPPU dan TPPT | 82 | Membangun Literasi APUPPT Melalui Perpustakaan dan AMLCFT Journal | 118 |
| Kata Pimpinan | x | Evaluasi Dan Peningkatan Kualitas Laporan Ke PPATK | 32 | Penanganan DTTOT..... | 84 | Pelatihan APUPPT | 120 |
| Struktur Organisasi | xii | Pengelolaan Direktori Pihak Pelapor | 36 | Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana | 86 | Pengawasan Internal..... | 126 |
| Daftar Isi..... | xiv | Pihak Pelapor pada GoAML | 38 | Penyusunan Kajian Hukum Tahun 2023 | 88 | PENGHARGAAN & PENCAPAIAN 2023 | 129 |
| Strategi Nasional..... | 2 | Buletin Statistik APUPPT PPSPM Tahun 2023..... | 44 | KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN..... | 91 | PPATK Raih RAN PE Awards 2023 | 130 |
| Rencana Strategis | 3 | Statistik Laporan Transaksi | 46 | Anggaran PPATK | 92 | Penyelenggaraan Satu Data Indonesia | 132 |
| KEGIATAN ANALISIS DAN PEMERIKSAAN..... | 5 | Pembinaan Pihak Pelapor | 47 | Komposisi SDM PPATK | 94 | BKN Award 2023 | 136 |
| Kontribusi Penerimaan Negara | 6 | Pengawasan Kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan | 50 | Pengelolaan Barang Milik Negara..... | 96 | Predikat AA Sangat Memuaskan | |
| Resume Hasil Informasi Analisis 2023 | 8 | Pengawasan Kepatuhan bagi Penyedia Barang/Jasa dan Profesi lain..... | 52 | Festival Kreatif Anti Pencucian Uang..... | 100 | Kearsipan PPATK | 138 |
| Resume Kasus Terkait Isu Publik | 10 | KEGIATAN STRATEGI DAN KERJASAMA | 55 | Penyusunan Strategi Komunikasi Penanganan Krisis Komunikasi di lingkungan PPATK..... | 101 | PPATK Raih Penghargaan dari BNN..... | 140 |
| Resume Kasus <i>Green Financial Crime</i> | 12 | Keanggotaan Indonesia di FATF..... | 56 | Trackaml Hackaton | 102 | Sinergi PPATK - Ditjen Pajak | |
| Resume Kasus Terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang | 14 | Kemajuan Efektivitas Rezim APU-PPT Indonesia..... | 64 | AML SMART Competition 2023..... | 104 | Optimalisasi Penegakan Hukum Pajak | 142 |
| Resume Kasus Koperasi | 16 | Strategi Nasional Rezim Anti Pencucian Uang | 66 | AML-CTF <i>Office Battle</i> 2023..... | 106 | Partisipasi dan Prestasi PPATK dalam Mendukung Keketuaan ASEAN 2023 | 146 |
| Resume Kasus Narkotika | 18 | Program Mentoring Berbasis Risiko 2023..... | 70 | Kompetisi Debat APUPPT | 108 | BAZNAS Award 2023 | 148 |
| KEGIATAN PELAPORAN DAN PENGAWASAN KEPATUHAN..... | 21 | Kerjasama dalam Peningkatan Kualitas Demokrasi Indonesia | 72 | PPATK Mengajar..... | 110 | GLOSARIUM | 150 |
| Koordinasi dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah | 22 | Capaian MoU | 76 | Membangun Vibrasi APUPPT | 112 | | |
| Pemilu sebagai Alat Integrasi Bangsa..... | 29 | Penandatanganan MoU dengan Bawaslu..... | 80 | Pengaduan Masyarakat | 114 | | |
| | | | | Layanan Bantuan..... | 116 | | |



STRATEGI NASIONAL

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TPPU-TPPT TAHUN 2020-2024

STRATEGI 01

Meningkatkan kemampuan sektor privat untuk mendeteksi indikasi atau potensi TPPU, TPPT, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dengan memperhatikan penilaian risiko

STRATEGI 02

Meningkatkan upaya pencegahan terjadinya TPPU dan TPPT dengan memperhatikan penilaian risiko

STRATEGI 03

Meningkatkan upaya pemberantasan terjadinya TPPU dan TPPT dengan memperhatikan penilaian risiko

STRATEGI 04

Mengoptimalkan *asset recovery* dengan memperhatikan penilaian risiko

STRATEGI 05

Meningkatkan efektivitas *targeted financial sanction* dalam rangka mendisrupsi aktivitas terorisme, teroris, organisasi teroris, dan aktivitas pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal

RENCANA STRATEGIS



TUJUAN

Memperkuat rezim anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di Indonesia

SASARAN STRATEGIS

Terwujudnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indeks efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme Indonesia

TARGET

2020 : 5.46
2021 : 5.73
2022 : 6.89
2023 : 7.23
2024 : 7.60

KEGIATAN ANALISIS DAN PEMERIKSAAN

| | |
|---|----|
| Kontribusi Penerimaan Negara | 6 |
| Resume Hasil Informasi Analisis 2023 | 8 |
| Resume Kasus Terkait Isu Publik | 10 |
| Resume Kasus <i>Green Financial Crime</i> | 12 |
| Resume Kasus Terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang | 14 |
| Resume Kasus Koperasi | 16 |
| Resume Kasus Narkotika | 18 |

KONTRIBUSI PENERIMAAN NEGARA

Kontribusi Hasil Pemeriksaan PPATK dalam Peningkatan Penerimaan Negara

PADA Semester I Tahun 2023, PPATK turut membantu penerimaan negara dari satu Hasil Analisis PPATK atas perkara yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan atas kasus tersebut telah berkontribusi pada pemulihan atas kerugian negara sebesar Rp317 miliar dan penyitaan aset milik tersangka berupa tanah bangunan, kendaraan, obligasi, dan uang dalam rekening bank. Atas kasus tersebut juga dikenakan tuntutan TPPU terhadap tersangka perseorangan yang merupakan pemilik dari perusahaan penghindar pajak.

Kasus pidana ini melibatkan transaksi keuangan lintas negara antara lain Singapura, Malaysia, Hongkong dan *British Virgin Island* serta dukungan kerjasama domestik yang baik dalam menunjang keberhasilan pengungkapan kasus

antara lain seperti Direktorat Jenderal Pajak, Kepolisian, Kementerian Hukum dan HAM dan Kejaksaan. Selain itu, PPATK berkontribusi dalam pemantauan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh beberapa wajib pajak yang bergerak di industri sawit. Hasil Pemeriksaan/Hasil Analisis terkait beberapa perusahaan sawit telah disampaikan PPATK ke DJP guna ditindaklanjuti dari sisi kepatuhan perpajakannya.

Selain itu, sejak Januari 2020 sampai dengan Juni 2023 atas Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan RI terkait indikasi/dugaan tindak pidana di bidang perpajakan, baik secara proaktif maupun atas permintaan DJP telah

menghasilkan potensi penerimaan negara sebesar **Rp11.611.670.858.370,-** dengan realisasi penerimaan negara mencapai lebih dari **Rp9,7 triliun**. Sedangkan, realisasi penerimaan negara pada periode sebelumnya sebesar Rp7,04 triliun. Terdapat peningkatan signifikan atas penerimaan negara pada Semester I Tahun 2023 yang didukung oleh kontribusi PPATK dalam proses penagihan oleh DJP terkait perkara pengalihan saham dan tanah bangunan milik wajib pajak badan sebesar **Rp2,1 triliun**. (*note*: Rp2,1 T sudah termasuk didalam angka Rp9,7 T di atas).

Selanjutnya, sampai dengan Juni 2023, terdapat tiga Hasil Pemeriksaan PPATK atas perkara yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan atas tiga Hasil Pemeriksaan tersebut telah berkontribusi pada penerimaan negara dari denda sebesar Rp1,65 miliar, dan uang pengganti sebesar sebesar Rp13,9 miliar dan SGD 1.095.000 serta penyitaan aset Obligor BLBI berupa tanah dan bangunan atas seluas total keseluruhan 89,01 Hektar dengan total nilai aset diperkirakan sekitar Rp2 triliun.

Potensi Penerimaan Negara
Rp11.611.670.858.370,-

Realisasi Penerimaan Negara
Rp9,7 triliun

Realisasi Penerimaan Negara Semester 1 Tahun 2023
Rp2,1 triliun



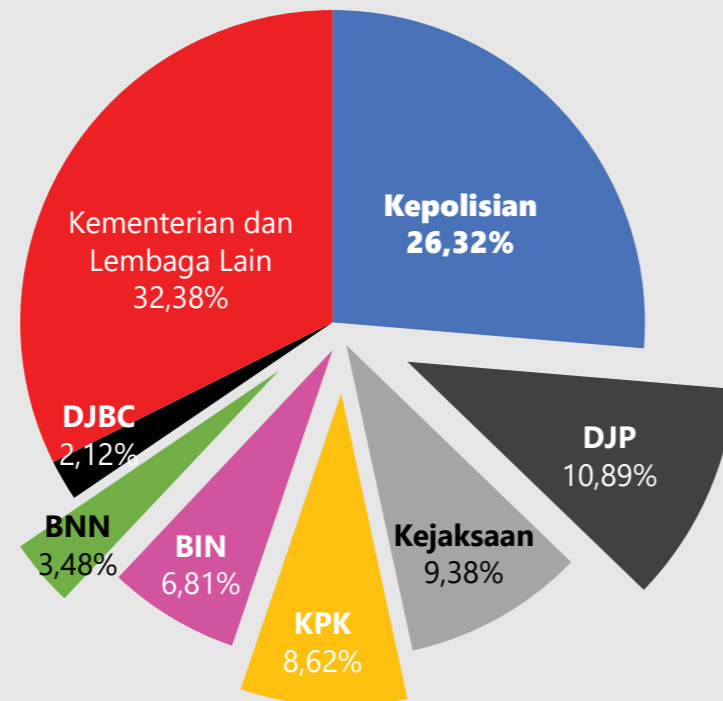
RESUME HASIL/INFORMASI ANALISIS 2023

Selama **Januari sd 30 Juni 2023**, PPATK telah menyampaikan Hasil Analisis, Hasil Pemeriksaan, dan Informasi kepada aparat penegak hukum dan instansi terkait sebanyak 661 laporan.

Adapun rincian **aparat penegak hukum** dan instansi terkait yang menerima Hasil Analisis, Hasil Pemeriksaan, dan Informasi PPATK adalah sebagai berikut Kepolisian (174), Direktorat Jenderal Pajak (72), Kejaksaan (62), Komisi Pemberantasan Korupsi (57), Badan Intelijen Negara (45), Badan Narkotika Negara (23), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (14), serta Kementerian dan Lembaga Lain.

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Kepolisian | 174 |
| Direktorat Jenderal Pajak | 72 |
| Kejaksaan | 62 |
| Komisi Pemberantasan Korupsi | 57 |
| Badan Intelijen Negara | 45 |
| Badan Narkotika Negara | 23 |
| Direktorat Jenderal Bea dan Cukai | 14 |
| Kementerian dan Lembaga Lain | 214 |

Statistik Apgakum Penerima LHA, LHP dan Informasi PPATK

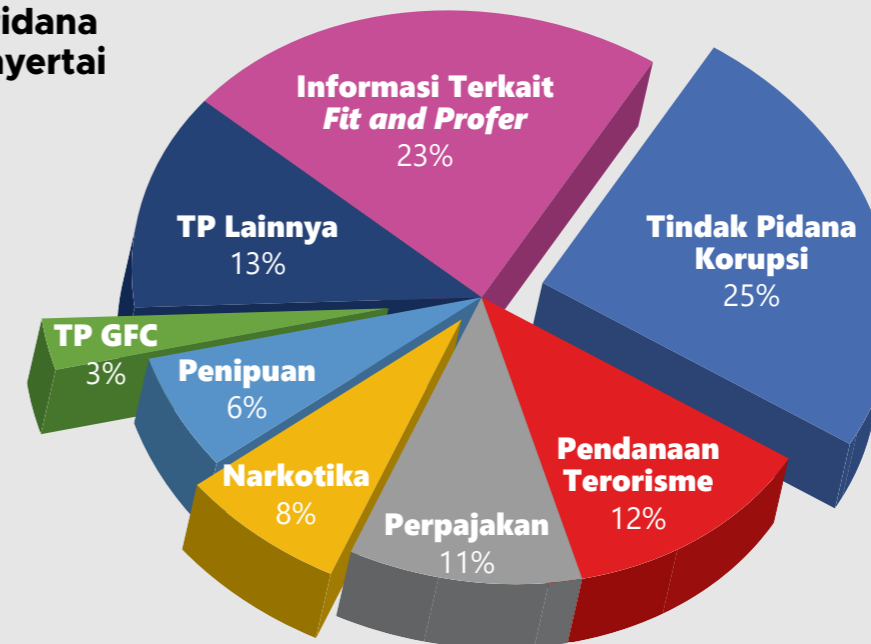


Selain itu, sampai dengan Juni 2023 PPATK telah menyampaikan **15 informasi ke FIU negara lain**.

Adapun indikasi Tindak Pidana Pencucian Uang dan dan Tindak Pidana Lain atas Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan didominasi dengan tindak pidana korupsi (164), pendanaan

terorisme (82), perpajakan (71), Narkotika (50), dan penipuan (42), tindak pidana terkait *Green Financial Crime* (19), dan tindak pidana lainnya (83). Selain itu Selama periode semester I tahun 2023, PPATK telah menerima dan mengirimkan informasi terkait proses *fit and proper* sebanyak 150 Informasi ke sejumlah Kementerian dan Lembaga.

Statistik Indikasi Tindak Pidana Lain Menyertai TPPU



RESUME KASUS TERKAIT ISU PUBLIK

SDR. A merupakan pejabat di suatu kementerian dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Bagian Umum. Diketahui rekening pribadi Sdr. A hanya menampung gaji dan tunjangan. Disisi lain rekening perusahaan Sdr. A menerima transaksi dana masuk dengan nilai yang signifikan, salah satunya transaksi di perusahaan IT milik Sdr. A yaitu PT CC yang berdiri tahun 2008 dengan komisarisnya Istri ybs. Berdasarkan informasi perbankan diketahui PT CC memiliki 38 rekening, namun hanya 2 (dua) rekening yang aktif bertransaksi di periode 2019 sd 2022.

Pola transaksi rekening PT CC nomor 1 menunjukkan komposisi antara pendapatan usaha senilai Rp25.703.137.380,00 tidak sebanding dengan pembayaran ke vendor atau perusahaan IT lain yang hanya

Rp5.108.231.397,00 sehingga rekening ini tidak mencerminkan pola transaksi perusahaan penjualan software. Disisi lain Rekening PT CC nomor 2 dana masuk seluruhnya bersumber dari perusahaan kelapa sawit PT ACL sebesar **Rp7.623.480.173,00** yang kemudian seluruhnya mengalir ke PT AG sebagai vendor software senilai **Rp7.622.980.173,00** dan kemudian *dormant* setelah Februari 2020, sehingga diduga rekening ini dibuka hanya untuk menampung dana dari PT ACL.

Berdasarkan analisa perusahaan pengirim dana ke rekening PT CC, seluruh perusahaan tersebut telah berinvestasi software dengan nilai yang signifikan namun dipakai dalam waktu yang singkat dengan tidak ditemukan lagi pembayaran perpanjangan lisensi setelah Februari 2022.

Pembelian software perusahaan-perusahaan tersebut menunjukkan pola pengadaan IT yang tidak wajar. Diketahui pula perusahaan-perusahaan pengirim dana ke rekening CC berperkara di kementerian Sdr. A disekitar tahun 2019. Atas pola transaksi PT CC diduga rekening PT CC dimanfaatkan untuk menampung dana suap/gratifikasi baik untuk

Sdr. A pribadi maupun untuk orang lain dengan memanfaatkan kewenangan Sdr. A dengan menggunakan *underlying* pembelian software IT.



RESUME KASUS TERKAIT **GREEN FINANCIAL CRIME (GFC)**

IBO adalah mantan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan saat ini teridentifikasi menjadi pengurus dan pemegang saham di beberapa perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, yaitu PT AKP dan PT EMP. PT AKP dan PT EMP tidak terdaftar dalam database MODI ESDM (Minerba One Data Indonesia Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia) sehingga keduanya diduga kuat melakukan kegiatan pertambangan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam periode Januari 2018 s.d. awal November 2022, IBO, PT AKP, PT EMP dan istri IBO (HAS) menerima dana dari para pihak yang memiliki usaha tambang, baik yang berizin maupun tidak berizin dengan

total nilai Rp844,1M. Dana keluar dari rekening IBO, PT AKP, PT EMP dan HAS ditujukan ke para pihak yang dominan adalah perorangan untuk kepentingan pembayaran batu dengan total nilai Rp438,7M. Atas dasar tersebut IBO, PT AKP, PT EMP dan HAS diduga melakukan kegiatan ilegal karena melakukan penjualan/pengangkutan hasil tambang berupa batu bara tanpa izin.

Selain PT AKP dan PT EMP, IBO juga diduga merupakan pemilik manfaat dari perusahaan tambang lain, yaitu PT BIC dan PT GBK. Kedua perusahaan tersebut juga diduga melakukan pelanggaran karena tidak memiliki IUP serta menampung dan/atau membeli batu bara dari pihak yang tidak memiliki IUP.



RESUME KASUS TERKAIT TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

PPATK melakukan analisa terkait dengan isu publik atas dugaan adanya eksploitasi dan perdagangan manusia atas Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kamboja. PMI tersebut di berangkatkan secara non prosedural oleh sindikat perdagangan manusia yang selanjutnya diduga dieksploitasi dan mengalami perbudakan dengan dipaksa bekerja di perusahaan *online scamming* dan judi online di Kamboja.

PPATK bekerja sama dengan LSM dan penyidik dalam menangani kasus eksploitasi PMI di Kamboja tersebut, utamanya dengan pertukaran informasi yang kemudian ditindaklanjuti dengan analisis oleh PPATK.

Atas pertukaran informasi tersebut, PPATK telah menyampaikan 3 Hasil Analisis ke Kepolisian RI dan 1 Spontaneous ke FIU

Kamboja. Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disampaikan terdapat beberapa pihak yang menjadi jaringan dari TPPO Kamboja tersebut, dengan resume sebagai berikut:

1. **SUN (tersangka), CAR (tersangka), AMR (tersangka), dan ISU** berperan sebagai perekrut calon PMI dan banyak melakukan transaksi dengan para pihak yang diduga dalam rangka penyaluran/pembekalan PMI untuk penempatan kerja di Luar Negeri yaitu perusahaan/pemilik penyalur jasa tenaga kerja, pemilik jasa *tour and travel*, pihak penyedia paspor dan visa, serta guru Bahasa (Jepang dan Inggris), komisar dan direktur dari perusahaan perusahaan penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS) dan lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS) yang patut diduga terkait dengan kegiatan

penyaluran dan pengiriman PMI ke luar negeri.

2. **SUN, CAR, AMR** dan ISU bertanggung jawab kepada LW yang merupakan istri dari SH (WN Bangladesh yang diduga merupakan pihak yang menerima calon PMI pada saat tiba pertama kali di Kamboja).
3. **AMR** juga bekerja sama dengan NJU (tersangka) yang memberangkatkan para calon PMI ke Kamboja.

4. **EGU** (WNI yang bekerja di perusahaan *scammer* di Kamboja) bersama dengan PA berperan sebagai pengumpul dana yang kemudian ditransfer ke rekening LW.

5. **AFA dan APP** merupakan perekrut awal di daerah juga berperan sebagai pihak pembeli tiket untuk para calon PMI.



RESUME KASUS TERKAIT KOPERASI

BERDASARKAN analisis transaksi keuangan KSP ISC diketahui adanya dugaan tindak pidana pencucian uang atas harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang dilakukan oleh pengurus KSP ISC dan Grup IS an. HS serta para pengurus lainnya. Dimana pada rekening KSP ISC di BCA periode 2013 s.d. 2023 diketahui adanya dana masuk total sebesar **Rp42.042.533.942.689,00** yang patut diduga terkait dengan transaksi simpan/pinjam yang ditawarkan oleh KSP ISC.

Modus yang teridentifikasi dari kasus KSP ISC diantaranya:

1. Transaksi penarikan tunai yang kemudian diketahui dilanjutkan dengan transaksi setoran tunai ke rekening para pihak lain yang patut diduga untuk memutus *audit trail* dan menyamarkan sumber dan penggunaan dana.

2. Perpindahan dana dalam jumlah signifikan dari rekening perusahaan dalam Grup ISC ke para pihak keluarga dari pengurus Grup ISC.
3. Mendirikan dan menggunakan rekening perusahaan-perusahaan terafiliasi dalam Grup ISC dengan bidang usaha *finance, property, batu bara, konsultan, pengelolaan gedung* yang terindikasi tidak menggambarkan usaha/bisnis perusahaan tersebut, bersifat *pass-by* dan patut diduga hanya digunakan untuk melakukan layering dana dan menyamarkan dan/atau menyembunyikan transaksi pemindahan dana hasil kejahatan.
4. Menggunakan sebagian dana untuk pembelian aset berupa kendaraan, properti, emas, dan lainnya.

5. Menggunakan sebagian dana untuk keperluan pribadi dan/atau keluarga pendiri dan/atau pengurus Grup ISC
6. Mengirimkan dana sebesar total **Rp1.910.274.187.701,00** ke beberapa negara di luar negeri diantaranya Amerika Serikat, Inggris, Italia, Singapura,

Luxembourg, Swiss dan Austria yang diduga digunakan untuk pembelian aset berupa yacht, limousine, *property* dan investasi seperti *trust fund* dan *peer to peer landing*.



KSP ISC di BCA
periode 2013 s.d. 2023
Rp42.042.533.942.689,00

RESUME KASUS TERKAIT NARKOTIKA

PPATK bersama BNN berhasil mengungkap dugaan praktek peredaran narkotika dan pencucian uang dari balik jeruji besi yang dilakukan oleh H alias S alias A (terpidana kasus narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap pada tahun 2015 dengan hukuman mati).

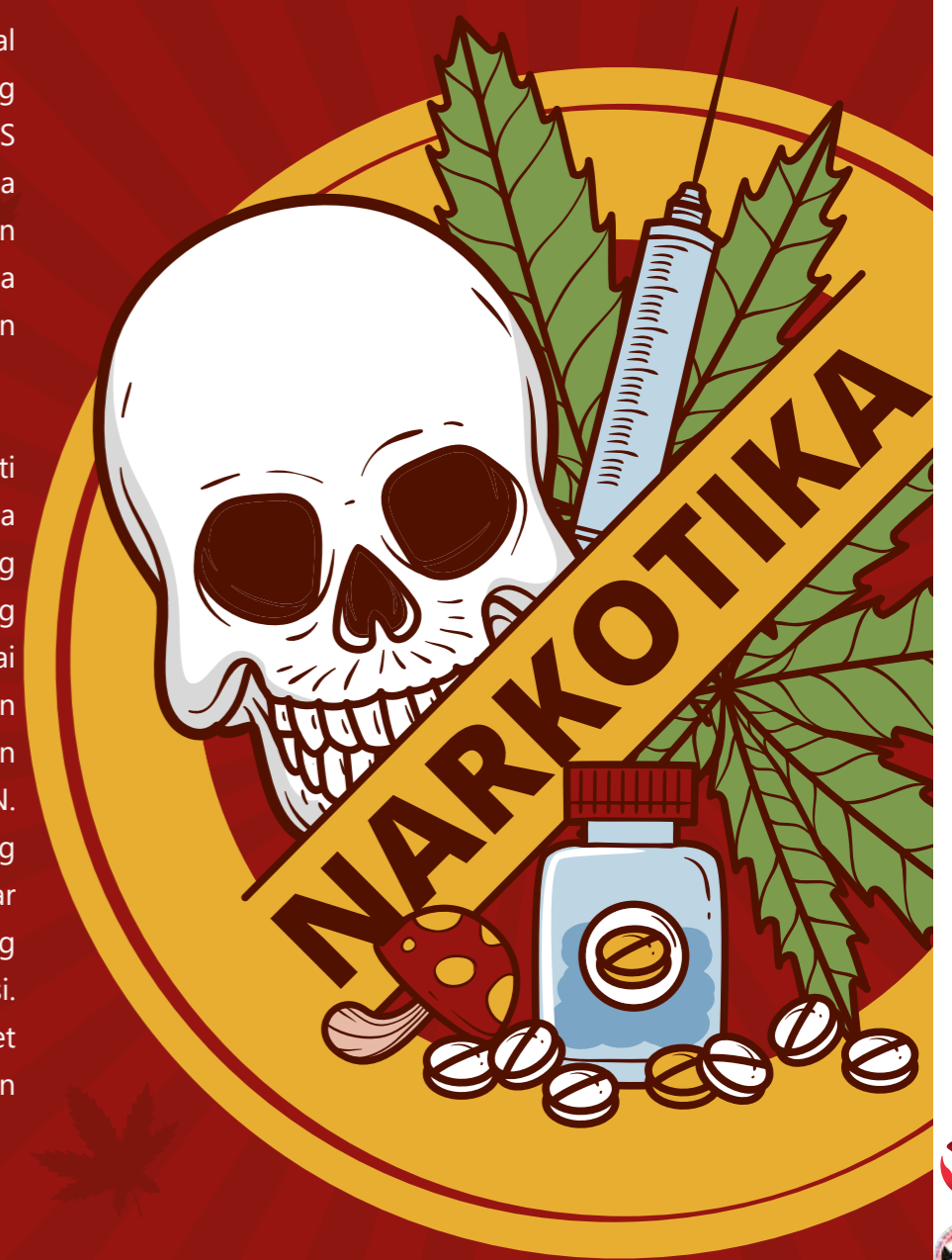
Sejak periode tahun 2017 s.d. awal tahun 2023 teridentifikasi bahwa rekening atas nama ybs di salah satu bank swasta aktif bertransaksi dengan total nilai perputaran dana mencapai Rp38 miliar yang sumber dananya diketahui berasal dari rekening atas nama para pihak yang digunakan/dikuasai oleh terpidana dan tersangka narkotika. H alias S alias A menguasai lebih dari 10 rekening atas nama pihak lain yang diantaranya adalah rekening atas nama kekasihnya H dan atas nama keluarga H. Pada

rekening para pihak yang dikuasai oleh H alias S alias A ditemukan adanya aliran dana yang diduga terkait pembelian aset berupa properti dan kendaraan bermotor.

Selain itu H alias S alias A juga menempatkan dana hasil narkotika melalui transaksi tunai ke rekening atas nama F yang merupakan anak ybs. Rekening F selama periode tahun 2017 s.d. awal tahun 2023 teridentifikasi memiliki total perputaran dana transaksi mencapai lebih dari Rp60 miliar. F yang masih berstatus sebagai mahasiswa tercatat sebagai komisaris pada 5 pada perusahaan yang bergerak di bidang multimedia, perikanan, konstruksi, dan perdagangan serta memiliki bisnis usaha waralaba di Jakarta. Seluruh unit usaha dan bisnis yang dikelola F diduga merupakan upaya mengaburkan dan menyamarkan asal

usul sumber dana yang berasal dari peredaran narkotika yang dikendalikan oleh H alias S alias A. Dana yang diterima F diantaranya digunakan untuk pembelian aset berupa polis asuransi, properti dan kendaraan bermotor.

PPATK telah melakukan henti transaksi atas dana yang diduga hasil narkotika pada rekening H alias S alias A dan rekening pihak yang diduga dikuasai oleh H alias S alias A dengan tindak lanjut pemblokiran rekening oleh penyidik BNN. Adapun total dana yang diblokir mencapai Rp8,4 miliar meliputi kepemilikan rekening perbankan dan asuransi. Penyidik juga telah menyita aset lainnya berupa properti dan kendaraan bermotor.



KEGIATAN

PELAPORAN DAN PENGAWASAN KEPATUHAN

| | |
|--|----|
| Koordinasi dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah | 22 |
| Pemilu sebagai Alat Integrasi Bangsa..... | 29 |
| Rapat Koordinasi Tahunan PPATK Tahun 2023..... | 30 |
| Evaluasi Dan Peningkatan Kualitas Laporan Ke PPATK..... | 32 |
| Pengelolaan Direktori Pihak Pelapor | 36 |
| Pihak Pelapor pada GoAML | 38 |
| Buletin Statistik APUPPT PPSPM Tahun 2023 | 44 |
| Statistik Laporan Transaksi | 46 |
| Pembinaan Pihak Pelapor | 47 |
| Pengawasan Kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan | 50 |
| Pengawasan Kepatuhan bagi Penyedia Barang/Jasa dan Profesi lain .. | 52 |



Membina Pihak Pelapor, Menjaga NKRI

KOORDINASI DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH

TAHUN 2024 akan menjadi momentum penting dengan diselenggarakannya pesta demokrasi besar-besaran di Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Pesta demokrasi dimulai dengan pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang

akan dilakukan secara serentak. Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada tersebut tentunya berpotensi memiliki tantangan dalam hal penerapan prinsip pelaksanaan Pemilu Pilkada yang antara lain jujur, adil, integritas serta akuntabel, khususnya dalam rangka mewujudkan Pemilu dan Pilkada yang berkualitas. Hal ini dimaksudkan agar proses demokrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak tercederai dengan tindakan-tindakan yang tidak terpuji antara lain adanya praktik politik uang (*money politic*).

Selanjutnya, guna mewujudkan Pemilu dan Pilkada yang sesuai dengan prinsip jujur, adil, integritas serta akuntabel tersebut, serta untuk memastikan tidak ditemuinya dana kampanye yang bersumber dari hasil tindak pidana dan/atau digunakan untuk kegiatan yang melanggar ketentuan pemilu pilkada, maka diperlukan suatu komitmen langkah bersama dari seluruh pemangku kepentingan dengan dibentuknya wadah kerja sama lintas sektoral berupa *Public Private Partnership* (PPP). PPP



ini merupakan kolaborasi pertukaran informasi antara *public sector* dan *private sector* yaitu PPATK, Pihak Pelapor, Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) dan Aparat Penegak Hukum (APH). Langkah bersama ini diwujudkan dalam suatu wadah Tim Kerja Analisis Kolaboratif Terkait Pemilu Pilkada (*Collaborative Analysis Team/CAT*).

Sehubungan dengan pelaksanaan Tim Kerja tersebut, diperlukan koordinasi yang berkesinambungan dengan seluruh stakeholders terkait yaitu Penyedia Jasa Keuangan (PJK), Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) serta Kementerian/Lembaga (K/L) guna mendiskusikan hal-hal antara lain komitmen bersama seluruh *stakeholders*, kebutuhan data/informasi, mekanisme kerja dari Tim Kerja serta evaluasi dari pelaksanaan Tim Kerja secara menyeluruh tersebut.

PPATK telah melaksanakan pertemuan koordinasi dengan para perwakilan *stakeholders* yang merupakan bagian dari anggota Tim Kerja pada tanggal 9 Maret 2023 di The Trans Resort Bali dan tanggal 23 Mei 2023 di Birawa Hall, Hotel Bidakara Jakarta.







**RASIO TINDAK PIDANA PENGUJI
MENGAKIBATKAN LEMAHNYA KE
PELUANG BAGI PELAKU ILLEGAL**

PEMILU SEBAGAI ALAT INTEGRASI BANGSA

LEBIH dari 400 perwakilan Pihak Pelapor hadir di aula Gedung Bidakara, Pancoran, Jakarta, Selasa 23 Mei 2023. Pertemuan ini membahas hal-hal teknis untuk mewujudkan pemilihan umum sebagai sarana integrasi bangsa yang berintegritas.

Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Pihak Pelapor membentuk Tim Kerja Kolaboratif Analisis Pemilu/Pilkada 2024, team ini terbentuk atas komitmen bersama pada pertemuan tahunan PPATK 2023 tanggal 19 Januari 2023 lalu di The Sultan Hotel & Residence, Jakarta.

“PPATK memberikan apresiasi kepada Bapak/Ibu pimpinan Penyedia Jasa Keuangan yang telah menugaskan pegawai terbaiknya untuk bergabung dalam Tim Kerja Kolaboratif Analisis Pemilu/Pilkada 2024”. Ujar Maimirza, Deputi Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan PPATK.

Anggota Tim Kerja melibatkan 408 orang dari 149 Penyedia Jasa Keuangan yang terdiri dari seluruh Bank Umum, perwakilan Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Pembiayaan, Penyelenggara E-Money dan/atau E-Wallet, Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang, Pedagang Valuta Asing, Perusahaan Efek, dan Pedagang Aset Kripto.

Adanya anggota tim kerja yang solid dan mampu bekerjasama merupakan kunci untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran Pemilu, disamping pertukaran informasi yang mengutamakan kecepatan waktu. “Kami menyampaikan ucapan dan terimakasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi aktif dari seluruh anggota Tim Kerja yang sudah dimulai sejak awal Tahun ini”, tambah Maimirza.

Pemilihan Pemimpin bangsa dan wakil rakyat yang dilakukan secara berintegritas tentunya membawa dampak positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. (MNK)

RAPAT KOORDINASI TAHUNAN PPATK TAHUN 2023

PPATK melaksanakan rapat koordinasi tahunan PPATK pada tanggal 19 Januari 2023. Pertemuan ini dihadiri oleh sekurangnya 500 orang yang merupakan perwakilan *stakeholders* pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT, dan PPSPM, diantaranya Direktur Utama dan Direktur Kepatuhan dari pihak pelapor, Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP), dan asosiasi pihak pelapor pada Golden Ballroom, The Sultan Hotel & Residence Jakarta.

Pertemuan yang rutin dilakukan setiap tahun ini bertujuan untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh *stakeholders* khususnya pihak pelapor yang telah berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU), tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT), dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah masal (PPSPM) serta untuk menyampaikan rencana strategis dan program kerja yang akan dilakukan guna mewujudkan Indonesia yang bersih dari TPPU, TPPT, dan PPSPM.

Agenda Rapat Koordinasi Tahunan PPATK Tahun 2023 mencakup pemberian informasi mengenai hal-hal yang telah dicapai oleh

PPATK bersama *stakeholders* selama Tahun 2022, Penguatan Peran Bersama (*Fight Againsts Green Financial Crime*), kolaborasi Pencegahan dan pemberantasan *Green Financial Crime* guna mewujudkan ekonomi hijau, serta strategi *public private partnership* dalam pencegahan politik uang.



RAPAT BILATERAL PPATK DENGAN BCA, BANK MANDIRI, BNI, BRI DAN BEBERAPA BANK DALAM RANGKA EVALUASI DAN PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KE PPATK

INDUSTRI perbankan merupakan industri Penyedia Jasa Keuangan (PJK) yang menyampaikan laporan terbesar kepada PPATK. Selama periode semester I 2023 sebanyak 99% laporan Pihak Pelapor berasal dari Industri Perbankan yakni sejumlah 27.628.327 laporan dengan mayoritas adalah Laporan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri (LTKL).

Dalam rangka peningkatan kualitas laporan Pihak Pelapor, PPATK sebagai pusat penerimaan laporan yang disampaikan oleh Pihak Pelapor melalui Direktorat Pelaporan melakukan evaluasi data pelaporan berdasarkan ketentuan dan pedoman mengenai tata cara penyampaian laporan kepada PPATK.

Hasil evaluasi yang telah disusun disampaikan kepada Pihak Pelapor guna dilakukan perbaikan internal dalam rangka peningkatan kualitas

laporan kepada PPATK. Salah satu bentuk penyampaian evaluasi kualitas laporan yang dilakukan oleh PPATK adalah melalui rapat koordinasi bilateral dan FGD dengan Pihak Pelapor.

**Penyedia Jasa
Keuangan (PJK) yang
menyampaikan laporan
terbesar kepada PPATK**

99%

Industri Perbankan

27.628.327
laporan

PPATK melalui Direktorat Pelaporan telah melaksanakan rapat koordinasi Bilateral dengan beberapa Pihak Pelapor yang telah

menyampaikan laporan kepada PPATK. Berikut daftar Pihak Pelapor yang telah diundang diantaranya:

| No | Nama PJK | Tanggal Pelaksanaan |
|-----|--|-------------------------|
| 1. | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | Rabu, 8 Februari 2023 |
| 2. | PT Bank Syariah Mandiri | Jumat, 10 Februari 2023 |
| 3. | PT Bank CIMB Niaga | Senin, 20 Februari 2023 |
| 4. | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | Jumat, 24 Februari 2023 |
| 5. | PT Bank Central Asia Tbk | Rabu, 01 Maret 2023 |
| 6. | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | Rabu, 01 Maret 2023 |
| 7. | PT Kangaroo Ausindo | Kamis, 2 Maret 2023 |
| 8. | PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda). | Jumat, 17 Maret 2023 |
| 9. | PT Bank Pan Indonesia Tbk | Rabu, 29 Maret 2023 |
| 10. | PT Bank DBS Indonesia | Selasa, 21 Maret 2023 |
| 11. | PT Bank Pembangunan Daerah Papua | Jumat, 16 Juni 2023 |
| 12. | Standard Chartered Bank Indonesia | Rabu, 21 Juni 2023 |

Selain mengundang secara bilateral beberapa Pihak Pelapor tersebut, juga telah dilaksanakan beberapa kegiatan *Focus Group Discussion* dengan beberapa industri pihak pelapor yaitu:

| No | Jenis Industri | Tempat/Tanggal Pelaksanaan |
|----|---------------------------------------|--|
| 1. | Perusahaan Pialang Berjangka Komoditi | Auditorium Yunus Husein PPATK 30 Mei 2023 |
| 2. | Perusahaan Properti | Auditorium Yunus Husein PPATK 20 Juni 2023 |
| 3. | Perusahaan Pembiayaan Konsumen | Auditorium Yunus Husein PPATK 22 Juni 2023 |



Kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan yang disampaikan oleh Pihak Pelapor dengan melakukan:

1. Evaluasi laporan yang telah disampaikan di Aplikasi goAML;
2. Menggali kendala atau permasalahan pelaporan yang dialami oleh Pihak Pelapor;
3. Membina komunikasi yang baik dengan Pihak Pelapor dan DJBC dalam rangka memberikan bantuan dalam hal kewajiban pelaporan;
4. Mendorong komitmen Pihak Pelapor untuk melakukan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki pelaporan ke PPATK.

Dengan laporan yang berkualitas, diharapkan proses analisis yang dilakukan oleh Analis PPATK akan memberikan hasil yang maksimal pada penegakan rezim APUPPT.

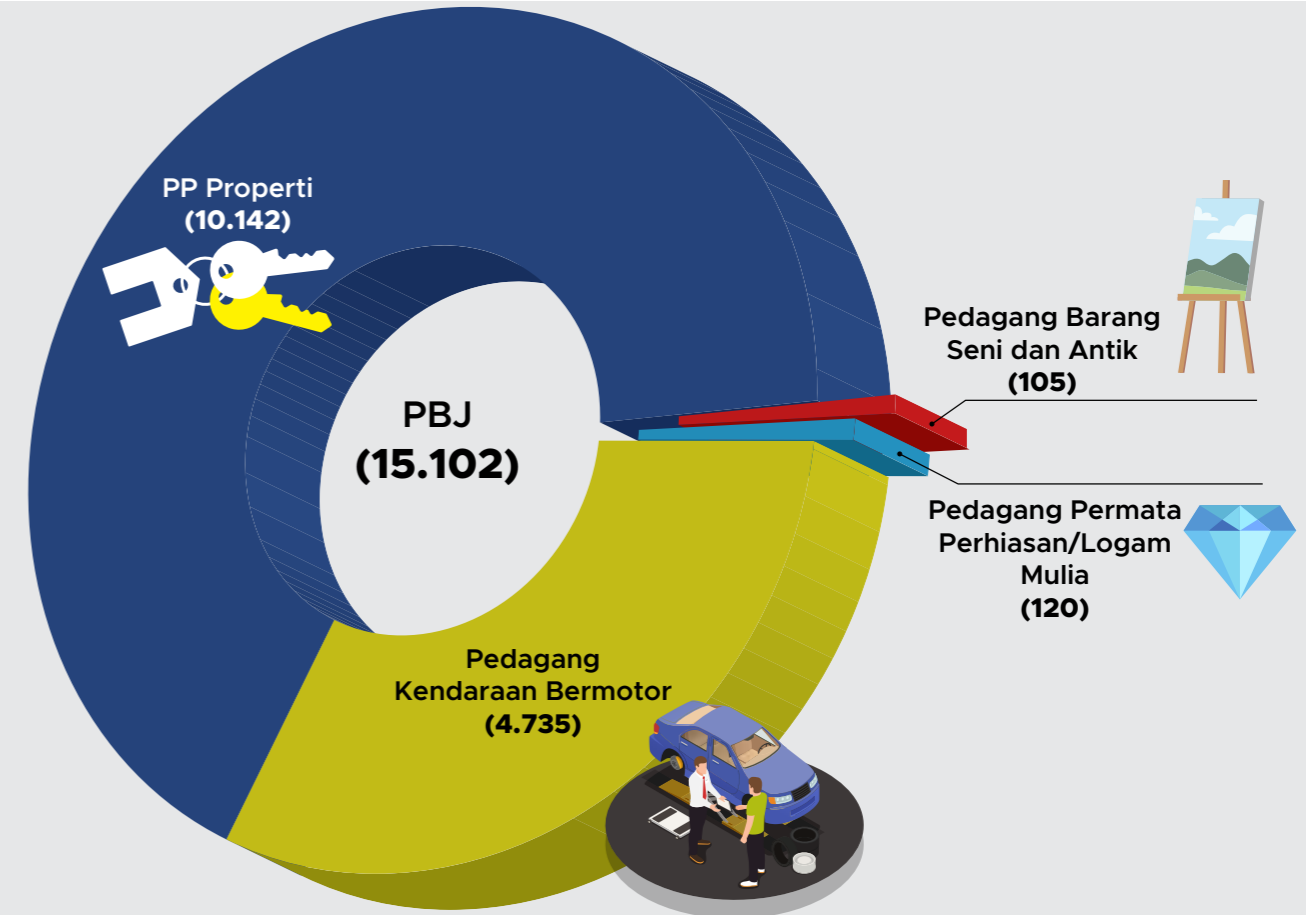
PENGELOLAAN

DIREKTORI PIHAK PELAPOR

BERKENAAN dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Pelaporan dalam pelaksanaan penyusunan Direktori Pihak Pelapor, Direktorat Pelaporan telah melaksanakan kegiatan pemadanan data Direktori Pihak Pelapor PPATK dengan data Pihak Pelapor yang terdaftar dan berizin di Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) serta data lainnya. Pemadanan data dilakukan dalam rangka memperoleh data Pihak Pelapor yang update, valid, dan lengkap.

Pada Semester I tahun 2023, Direktorat Pelaporan berfokus pada Pihak Pelapor yang dikategorikan ke dalam Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain (PBJ). Dalam kegiatan pemadanan data tersebut, PPATK bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM RI c.q. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) dalam rangka tersedianya

data Pihak Pelapor yang berstatus sebagai **badan hukum**. Setelah dilakukan koordinasi, rekonsiliasi, dan pemadanan data, Direktorat Pelaporan berhasil mengidentifikasi sebanyak **15.102 Pihak Pelapor** yang ditetapkan sebagai populasi PBJ dimaksud. Adapun rincian jumlah masing-masing PBJ adalah sebagaimana tergambar dalam grafik di samping.



Berdasarkan bagan tersebut di atas, diketahui bahwa persentase jumlah PBJ terbesar adalah **Perusahaan Properti/Agen Properti yaitu sebesar 67,16%**, kemudian **Pedagang Kendaraan Bermotor sebesar 31,35%**, Pedagang **Perhiasan dan Perhiasan / Logam Mulia sebesar 0,79%**, dan terakhir adalah **Pedagang Barang Seni dan Antik sebesar 0,70%**.

STATISTIK REGISTRASI PIHAK PELAPOR PADA GOAML

SELAMA periode Januari s.d. Juni 2023, PPATK melakukan verifikasi atas setiap permohonan registrasi organisasi yang disampaikan Pihak Pelapor pada aplikasi GoAML.

Total Pihak Pelapor secara kumulatif per Juni 2023 yang terdaftar pada sistem aplikasi GoAML dan berstatus aktif adalah sebanyak **37.228 Pihak Pelapor**. Jumlah ini meningkat sebesar 4,2% dari jumlah Pihak Pelapor yang terdaftar pada aplikasi GoAML per Semester II tahun 2022.

Adapun dilihat dari jenis Pihak Pelapor, jumlah Pihak Pelapor yang terdaftar pada aplikasi GoAML terdiri atas 5.056 Penyedia Jasa Keuangan (PJK), 2.000 Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain (PBJ), dan 30.172 Profesi. Statistik registrasi Pihak Pelapor selama periode Semester I tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Adapun peningkatan jumlah Pihak Pelapor paling besar pada aplikasi GoAML sepanjang Semester I tahun 2023 adalah Advokat sebesar 794,12%, Penyelenggara Layanan Urus Dana melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi dengan peningkatan sebesar 66,67%, dan Penyelenggara Layanan Transaksi Keuangan Berbasis Teknologi Informasi dengan peningkatan sebesar 50%.

Pihak Pelapor secara kumulatif per Juni 2023

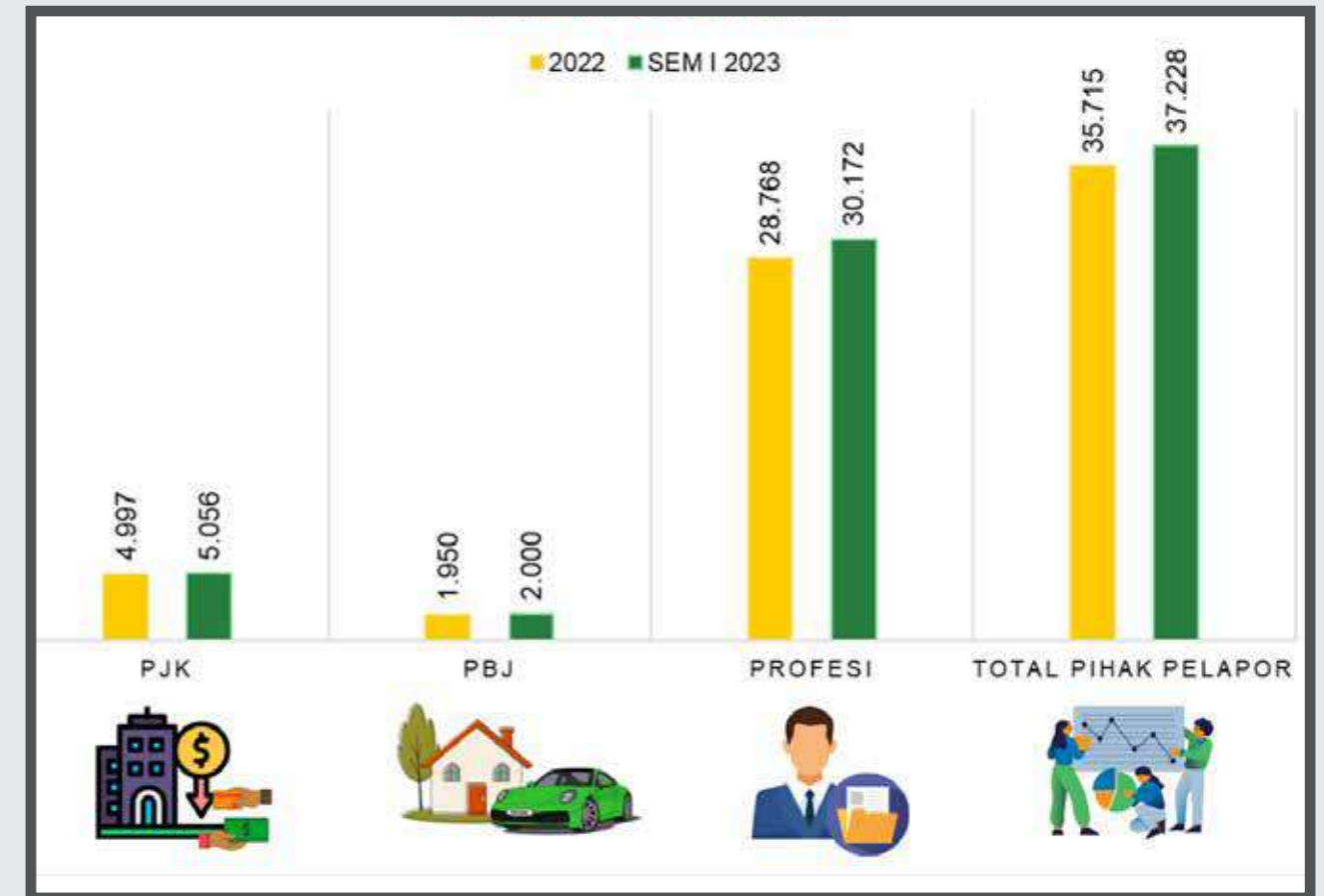
37.228

Pihak Pelapor

5.056 Penyedia Jasa Keuangan (PJK),
2.000 Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain (PBJ), dan **30.172 Profesi**.

Meningkatnya jumlah registrasi dari Pihak Pelapor pada GoAML merupakan cermin atas *awareness* dalam mendukung pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia mengingat potensi dan risiko pencucian uang pada sejumlah sektor

masih tinggi dan diperlukan dukungan yang diawali dengan pelaksanaan registrasi GoAML agar selanjutnya Pihak Pelapor dapat menyampaikan laporan kepada PPATK sebagai bahan pendukung analisis dan peneluran aset hasil tindak pidana.



| Jenis Pihak Pelapor (PP) | Orga-nisasi Aktif* per Sem II '22 | Rekap Registrasi Organisasi Baru Semester I Tahun 2023 | | | | | | | Total PP Non-aktif** pada Sem I '23 | Orga-nisasi Aktif per Sem I '23 |
|---|-----------------------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| | | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Total Regis-trasi Orga-nisasi Baru | | |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i = c + ... + h | j | k = b + i - j |
| Penyedia Jasa Keuangan | | | | | | | | | | |
| Bank | 110 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 111 |
| Bank Perkreditan Rakyat | 1.816 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 14 | 1 | 1.829 |
| Perusahaan Pembiayaan | 178 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 180 |
| Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 277 |
| Dana Pensiun Lembaga Keuangan | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Perusahaan Efek | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 132 |
| Manajer Investasi | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| Kustodian | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| Wali Amanat | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| Perposan sebagai Penyedia Jasa Giro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pedagang Valuta Asing | 987 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 994 |
| Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Penyelenggara E-Money dan / atau E-Wallet | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 |
| Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam | 753 | 4 | 6 | 3 | 0 | 4 | 1 | 18 | 0 | 771 |
| Pegadaian | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi*** | 98 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 102 |
| Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang | 229 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 232 |
| Perusahaan Modal Ventura | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Lembaga Keuangan Mikro | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 41 |
| Lembaga Pembiayaan Ekspor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi | 76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 80 |

| Jenis Pihak Pelapor (PP) | Orga-nisasi Aktif* per Sem II '22 | Rekap Registrasi Organisasi Baru Semester I Tahun 2023 | | | | | | | Total PP Non-aktif** pada Sem I '23 | Orga-nisasi Aktif per Sem I '23 |
|--|-----------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| | | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Total Regis-trasi Orga-nisasi Baru | | |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i = c + ... + h | j | k = b + i - j |
| Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Penyelenggara layanan transaksi keuangan berbasis teknologi informasi | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Total Penyedia Jasa Keuangan | 4.997 | 12 | 15 | 11 | 7 | 11 | 11 | 67 | 8 | 5.056 |
| Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain | | | | | | | | | | |
| Pejabat Lelang Kelas II | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| Perusahaan Properti / Agen Properti | 1.154 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 14 | 30 | 0 | 1.184 |
| Pedagang Kendaraan Bermotor | 421 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 16 | 0 | 437 |
| Pedagang Permata dan Perhiasan / Logam Mulia | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Pedagang Barang Seni dan Antik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Balai Lelang | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang | 70 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 74 |
| Total Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain | 1.950 | 3 | 9 | 6 | 2 | 6 | 24 | 50 | 0 | 2.000 |
| Profesi | | | | | | | | | | |
| Notaris | 17.122 | 35 | 134 | 81 | 392 | 451 | 137 | 1.230 | 11 | 18.341 |
| Akuntan | 385 | 3 | 2 | 17 | 1 | 4 | 1 | 28 | 0 | 413 |
| Akuntan Publik | 478 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 11 | 0 | 489 |
| Pejabat Pembuat Akta Tanah | 10.720 | 0 | 1 | 0 | 20 | 20 | 7 | 48 | 37 | 10.731 |
| Advokat | 17 | 0 | 0 | 2 | 35 | 34 | 67 | 138 | 3 | 152 |
| Perencana Keuangan | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| Total Profesi | 28.768 | 38 | 137 | 101 | 448 | 513 | 218 | 1.455 | 51 | 30.172 |
| Total Pihak Pelapor | 35.715 | 53 | 161 | 118 | 457 | 530 | 253 | 1.572 | 59 | 37.228 |

Keterangan :

- * **Organisasi Aktif** adalah Pihak Pelapor yang terdaftar pada GoAML dan berstatus aktif pada GoAML.
- ** **Pihak Pelapor Non-Aktif** adalah Pihak Pelapor yang akun organisasi GoAML-nya dinonaktifkan karena mengalami pencabutan izin usaha oleh LPP, penggabungan usaha (*merger*), akuisisi,

perubahan nama organisasi, dan/atau mengalami duplikasi data pada GoAML.

- *** **Jumlah organisasi** (*entity*) pada Pihak Pelapor jenis Perusahaan yang Bergerak di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi terdiri atas Perusahaan yang Bergerak di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Pedagang Aset Kripto.

Berdasarkan Tabel di atas, jumlah organisasi aktif pada GoAML yang terbesar secara berturut-turut adalah Profesi dengan jumlah 30.172 Pihak Pelapor, Penyedia Jasa Keuangan dengan jumlah 5.056 Pihak Pelapor, dan Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain dengan jumlah 2.000 Pihak Pelapor.

PPATK senantiasa berkoordinasi dengan Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) untuk melakukan rekonsiliasi data Pihak Pelapor sehingga peran LPP untuk melakukan pengawasan dan pembinaan dalam meningkatkan kepatuhan APUPPT bagi masing-masing Pihak Pelapor dapat turut menyukseskan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.



BULETIN STATISTIK APUPPT PPSPM TAHUN 2023: PERWAJAHAN DAN SUBSTANSI BARU BERORIENTASI PENGGUNA

MEMASUKI tahun 2023, PPATK melakukan evaluasi terhadap substansi dan desain Buletin Statistik APUPPT PPSPM untuk meningkatkan kepuasan pengguna. Dalam hal substansi, pada Buletin Statistik Tahun 2023 terdapat penambahan statistik penghentian sementara transaksi dan statistik pihak pelapor yang teregistrasi aktif pada aplikasi GoAML, serta penyederhanaan tabulasi yang dinilai terlalu kompleks.

Penyederhanaan tabulasi ditujukan agar buletin lebih konsisten dan lebih mudah dipahami pengguna dengan data tabulasi rinci tetap tersedia pada **Portal Satu Data PPATK** (<https://satudata.ppatk.go.id>). Penyempurnaan ini dilakukan atas evaluasi bersama antara walidata dan unit kerja produsen data pada tanggal 31 Januari 2023 berdasarkan identifikasi substansi baru, reviu substansi yang sudah ada, dan hasil survei kepuasan buletin statistik tahun 2022.

Dalam hal desain, buletin statistik tahun 2023 tampil dengan sentuhan yang berbeda bertemakan budaya, sesuai dengan semangat Rezim APUPPT dalam menjaga NKRI.

Setiap subyek statistik disajikan dalam bentuk infografis dan dilengkapi dengan ragam visualisasi data. Dalam proses transformasi wajah baru ini, pada tanggal 24 Januari 2023, PPATK melakukan *study visit* pada Badan Pusat Statistik untuk mendapatkan masukan penyempurnaan Buletin Statistik APUPPT Tahun 2022 dan pemahaman praktik terbaik (*best practice*) dalam penyusunan dan penyebarluasan publikasi statistik.

Di samping itu, PPATK melaksanakan peningkatan kompetensi pegawai dengan *In-House Training* Visualisasi Data dan Perwajahan Publikasi Statistik pada tanggal 14-15 Februari 2023 melalui praktik langsung desain buletin statistik studi kasus data buletin Januari 2023 dengan memanfaatkan perangkat lunak pendukung.



Tertarik mengeksplorasi buletin statistik APUPPT PPSPM? Statistik APUPPT dapat diperoleh pada: https://s.id/repositori_bulstatPPATK Adapun feedback kepuasan pengguna tahun 2023: https://s.id/feedback_bulstatPPATK2023.

Perwajahan baru buletin statistik APUPPT PPSPM Tahun 2023 serta penambahan substansi baru Buletin Statistik APUPPT-PPSPM Tahun 2023: Statistik penghentian sementara transaksi

STATISTIK LAPORAN TRANSAKSI SEMESTER I TAHUN 2023

DALAM rangka implementasi Rekomendasi Nomor 33 *Financial Action Task Force* (FATF) dan dalam rangka efektivitas upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT, PPATK berperan sebagai *leading institution* dalam penyajian data statistik terkait APUPPT di Indonesia. Adapun penyajian data statistik ini memuat informasi terkait peran dan fungsi

PPATK sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2013. Selama periode Januari s.d Juni 2023 penerimaan laporan ke PPATK dibandingkan periode **Januari s.d Juni 2022** meningkat sebesar **26,8%** sebagai berikut:



PEMBINAAN PIHAK PELAPOR DALAM RANGKA TINDAK LANJUT REKOMENDASI FIR ON ML/TF TAHUN 2022 DAN PERSIAPAN TAHUN 2023

SETELAH sukses menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan Pelaksanaan *Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorism Financing* (FIR on ML/TF) Tahun 2022 diketahui bahwa masih terdapat sekitar 32 Pihak Pelapor masuk dalam kategori kurang baik dan 74 pihak pelapor dalam kategori cukup baik.

Sebagai tindak lanjut atas hasil FIR on ML/TF Tahun 2022, PPATK melaksanakan pembinaan pihak pelapor dengan tujuan peningkatan tingkat efektivitas pihak pelapor dalam menjalankan kewajiban Kinerja Pelaporan APUPPT.

Pembinaan Pihak Pelapor dilakukan di 3 Kota yaitu Medan, Makassar dan Jambi pada bulan Maret s.d Mei 2023. Kegiatan pembinaan dituangkan dalam Berita Acara dengan pembahasan tanggapan atas nilai FIR yang

EVALUASI ATAS HASIL

FIR ON ML/TF TAHUN 2022

32 **74**

Pihak Pelapor
Kategori Kurang Baik

Pihak Pelapor
Kategori Cukup Baik

PEMBINAAN PIHAK PELAPOR

Maret s.d. Mei 2023

1. Medan
2. Makassar
3. Jambi

diperoleh, kendala yang dihadapi oleh Pihak Pelapor dalam implementasi regulasi terkait APU PPT, komitmen perbaikan/tindak lanjut rekomendasi, serta masukan pelaksanaan FIR dan pelaporan APUPPT.

Dengan adanya feedback atas pencapaian FIR on ML/TF bagi setiap Pihak Pelapor, diharapkan Pihak Pelapor dapat melakukan penguatan

Program APUPPT yang berkaitan dengan efektivitas kinerja Pelaporan APUPPT meliputi kebijakan dan petunjuk operasional untuk ketentuan-ketentuan yang menunjang kinerja pelaporan APUPPT yang bersifat kompleks serta program pengawasan dan pengendalian internal atas kinerja Pelaporan APUPPT yang lebih berkualitas.



Selain itu, PPATK juga menyiapkan pelaksanaan FIR on ML/TF Tahun 2023. Pelaksanaan FIR on ML/TF tahun 2023 ditargetkan kepada 400 pihak pelapor diantaranya Penyedia Jasa Keuangan Bank (Bank Umum dan BPR), Penyedia Jasa Keuangan Non-Bank (Pedagang Valuta Asing, Penyelenggara Transfer Dana dan Koperasi Simpan Pinjam) serta Penyedia Barang dan Jasa (PBJ).

Sampai dengan Juni 2023, telah dilakukan pembahasan naskah akademik sebagai acuan dalam pengukuran FIR on ML/TF Tahun 2023 dan infrastruktur e-survey sebagai media pengumpulan data. PPATK akan melaksanakan *launching* FIR on ML/TF Tahun 2023 pada bulan Juli 2023 dan diharapkan Indeks FIR on ML/TF Tahun 2023 dapat didiseminasikan pada bulan November 2023.



TARGET

FIR ON ML/TF

TAHUN 2023

400

Pihak Pelapor

- **Penyedia Jasa Keuangan BANK**
Bank Umum & BPR
- **Penyedia Jasa Keuangan NON-BANK**
Pedagang Valuta Asing, Penyelenggara Transfer Dana, dan Koperasi Simpan Pinjam



PENGAWASAN KEPATUHAN PENYEDIA JASA KEUANGAN

DALAM rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor guna optimalisasi pencegahan TPPU dan TPPT, Direktorat Pengawasan Kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan melaksanakan serangkaian kegiatan audit kepatuhan dan audit khusus terhadap Penyedia Jasa Keuangan.

Pengawasan Kepatuhan tersebut dilaksanakan dalam rangka mengawasi kepatuhan pihak pelapor dalam menerapkan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ) dan melaksanakan kewajiban pelaporan kepada PPATK. Semester I 2023 telah dilaksanakan kegiatan pengawasan Kepatuhan kepada 14 PJK yaitu:

| No | Jenis Industri | Jumlah | Mekanisme Audit |
|----|--|--------|--|
| 1 | Bank Umum | 3 | <i>Joint Audit</i> Otoritas Jasa Keuangan |
| 2 | Kelompok Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) | 4 | <i>Joint Audit</i> Bank Indonesia dan Audit Khusus |
| 3 | Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank (PTD BB) | 4 | |
| 4 | Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam (KSP) | 3 | Kementerian Koperasi dan UKM |



Berdasarkan kegiatan audit kepatuhan dan *joint audit* tersebut secara umum masih ditemukan kelemahan dalam penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ) serta pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh pihak pelapor. Terkait dengan penerapan PMPJ masih ditemukan kelemahan pengawasan aktif dewan direksi dan komisaris terkait dengan penerapan APU dan PPT, kebijakan dan prosedur yang belum memadai, sistem informasi yang masih perlu disempurnakan, SDM dan pelatihan yang masih minim serta pengendalian internal yang belum berjalan.

Adapun terkait dengan masih ditemukannya laporan yang belum dilaporkan oleh pihak pelapor baik itu Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kurangnya pemahaman pegawai pihak pelapor terkait dengan pelaksanaan kewajiban pelaporan serta sistem pemantauan transaksi yang tidak memadai. Terkait temuan hasil audit tersebut DPK PJK merekomendasikan penerapan sanksi terhadap 2 (dua) PJK kepada Bank Indonesia.

Selain kegiatan tersebut di atas, DPK PJK juga telah menyelesaikan 8 (delapan) laporan pemantauan atas pemenuhan komitmen hasil audit.

PELAKSANAAN BIMBINGAN TEKNIS

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan dalam memenuhi kewajibannya serta meningkatkan efektifitas pengawasan kepatuhan berbasis risiko terhadap PJK, maka dilakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) guna memberikan pemahaman kepada PJK mengenai penerapan program APU PPT. Kegiatan ini dilaksanakan dengan bekerja sama dengan Regulator seperti Kementerian Koperasi dan UKM dan Bank Indonesia serta Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan. Kegiatan ini diikuti 164 Pihak Pelapor yang terdiri dari Koperasi Simpan Pinjam, KUPVA dan PTD serta Bank.

PENGAWASAN KEPATUHAN BAGI PENYEDIA BARANG DAN/ATAU JASA LAIN DAN PROFESI

Selama periode bulan Januari 2023 sampai dengan Juni 2023, Direktorat Pengawasan Kepatuhan bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain dan Profesi (DPK PBJP) telah melaksanakan 23 (dua puluh tiga) audit kepatuhan, 6 (enam) audit khusus serta 2 (dua) *joint audit* bersama dengan Lembaga Pengawas dan Pengatur.

Objek audit tersebut terdiri dari 21 (dua puluh satu) perusahaan properti/agen properti, 6 (enam) pedagang kendaraan bermotor, 2 (dua) balai lelang, serta 3 (tiga) advokat. Selanjutnya, DPK PBJP telah melaksanakan survei penilaian risiko pada bulan Februari 2023, dengan mengirimkan kepada 56 (lima puluh enam) Pihak Pelapor, yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) pedagang kendaraan bermotor, 23 perusahaan properti/agen properti, serta 4 (empat) pedagang permata dan perhiasan/logam mulia. Dalam rangka menjalankan

fungsi pengawasan kepatuhan, DPK PBJP telah melaksanakan pembinaan Pihak Pelapor pada bulan Februari 2023 kepada 52 (lima puluh dua) lembaga, pada bulan Maret 2023 kepada 61 (enam puluh satu) lembaga, dan bulan April 2023 kepada 48 (empat puluh delapan) lembaga.

Kemudian, DPK PBJP juga telah mengenakan sanksi berupa teguran tertulis kepada 20 (dua puluh) Pihak pelapor yang terdiri dari 5 (lima) pedagang kendaraan bermotor dan 15 (lima belas) perusahaan properti/agen properti akibat keterlambatan penyampaian pelaporan oleh Pihak Pelapor atas hasil temuan audit oleh DPK PBJP. Selain itu, terdapat sanksi lain yaitu pengumuman kepada publik melalui website PPATK juga telah dikenakan kepada 1 (satu) Pihak Pelapor akibat tidak dapat memenuhi komitmen hasil audit kepatuhan.

STATISTIK PENGAWASAN KEPATUHAN PENYEDIA BARANG DAN/ATAU JASA LAIN DAN PROFESI

JANUARI s.d. JUNI 2023

31

Audit

23

Audit Kepatuhan

6

Audit Khusus

2

Joint Audit bersama Lembaga Pengawas Pengatur

OBJEK AUDIT

32

Pihak Pelapor

21

Perusahaan Properti / Agen Properti

6

Pedagang Kendaraan Bermotor

2

Balai Lelang

3

Advokat

PEMBINAAN PIHAK PELAPOR

(lembaga pihak pelapor)

161

Lembaga

52

Februari 2023

61

Maret 2023

48

April 2023

SANKSI TEGURAN TERTULIS

atas keterlambatan penyampaian pelaporan atas hasil temuan audit

20

Pihak Pelapor

5

Pedagang Kendaraan Bermotor

15

Perusahaan Properti / Agen Properti

01

Pihak Pelapor

SANKSI LAIN

Tidak Memenuhi Komitmen hasil Audit Kepatuhan



KEGIATAN STRATEGI DAN KERJASAMA

| | |
|---|----|
| Keanggotaan Indonesia di FATF..... | 56 |
| Kemajuan Efektivitas Rezim APU-PPT Indonesia..... | 64 |
| Strategi Nasional Rezim Anti Pencucian Uang | 66 |
| Program Mentoring Berbasis Risiko 2023..... | 70 |
| Kerjasama dalam Peningkatan Kualitas Demokrasi Indonesia | 72 |
| Capaian MoU | 76 |
| Penandatanganan MoU dengan Bawaslu..... | 80 |
| Koordinasi dan Asistensi Penanganan Perkara Dugaan TPPU dan TPPT | 82 |
| Penanganan DTTOT..... | 84 |
| Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana | 86 |
| Penyusunan Kajian Hukum Tahun 2023 | 88 |

PERKEMBANGAN TERKINI KEANGGOTAAN INDONESIA DI FATF

Komitmen Kuat Indonesia Menjadi Negara Anggota FATF

INDONESIA sejak 2018 masih berstatus sebagai *observer* FATF dan merupakan satu-satunya negara anggota G-20 yang saat ini belum menjadi anggota penuh FATF. Oleh karena itu, Indonesia terus membangun komitmen yang kuat untuk menjadi anggota penuh FATF secara menyeluruh dimana komitmen tersebut telah menjadi *high level commitment* dari level Presiden RI Ir. Joko Widodo, Menko Polhukam, Menko Perekonomian, para Menteri/Kepala Lembaga, Komite TPPU sampai kepada level teknis. Wujud komitmen terbaru dari Presiden RI dibuktikan pada pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam rangkaian kegiatan G-7 di Jepang pada 21 Mei 2023 dimana poin pertama yang disampaikan oleh Presiden RI adalah Indonesia meminta



Presiden RI dan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam Kegiatan G-7 di Jepang pada 21 Mei 2023

dukungan Prancis agar Indonesia segera diterima sebagai anggota penuh FATF.

Keanggotaan penuh Indonesia di FATF merupakan langkah strategis dan penting

Manfaat dan Implikasi Kenggotaan Penuh FATF Bagi Indonesia

- 1 Indonesia dapat ikut menentukan standar kebijakan dan tata kelola global terkait anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme
- 2 Persepsi terhadap integritas sistem keuangan dan stabilitas perekonomian Indonesia yang semakin baik
- 3 Penguatan *international exposure* Indonesia dalam Rezim APUPPT Internasional
- 4 Peningkatan Kerja Sama Internasional dalam memerangi Pencucian Uang

dengan mempertimbangkan manfaat dan implikasinya bagi Indonesia yaitu:

- Indonesia dapat ikut menentukan standar kebijakan dan tata kelola global terkait anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dengan konteks negara berkembang sehingga dapat sejalan dengan kepentingan Indonesia;
- Persepsi terhadap integritas sistem keuangan dan stabilitas perekonomian Indonesia yang semakin baik, antara lain pelaku ekonomi Indonesia dapat lebih diterima dalam dunia bisnis internasional, dan pendanaan pinjaman internasional yang lebih murah serta meningkatkan iklim investasi yang positif di Indonesia; dan
- Penguatan *international exposure* Indonesia untuk turut serta dan berperan aktif dalam menilai dan meningkatkan kepatuhan negara lain terhadap standar internasional FATF terkait Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT).
- Peningkatan efektivitas kerja sama internasional dalam memerangi pencucian uang serta pendanaan terorisme.

Perjuangan Indonesia dalam *FATF Plenary* pada 20-24 Februari 2023 di Perancis

SETELAH melalui berbagai tahapan teknis sejak 2019 sampai 2022, proses keanggotaan Indonesia di FATF diuji dalam tahapan politis pada *FATF Plenary* yang dilaksanakan secara tatap muka di Perancis pada 20-24 Februari 2023. Dalam tahapan politis ini, Indonesia mencapai berbagai kesuksesan strategis antara lain:

- Indonesia berhasil mempertahankan Nilai (*Rating*) dalam tahapan teknis yang sudah Substantial yaitu pada IO 1, 2, 6 dan 9. Tidak ada negara anggota FATF yang mengusulkan penurunan *rating* pada hasil MER Indonesia.
- Indonesia memperoleh pernyataan politik berupa 11 negara anggota FATF yang memberikan apresiasi dan dukungan penuh untuk Indonesia. Tidak ada negara yang menyatakan bahwa Indonesia patut ditolak atau tidak dipertimbangkan menjadi negara anggota FATF. Jenis sikap politik lainnya adalah 6 negara ingin mendalami lagi terkait capaian MER Indonesia, 1 negara menyatakan pendapat yang bersifat netral, dan 19 anggota FATF lainnya tidak menyampaikan pendapat/intervensi.

Resume Hasil *FATF Plenary* Perancis 20-24 Februari 2023

- Tidak ada negara anggota FATF yang mengusulkan penurunan *rating* pada hasil MER Indonesia
- Statistik Pernyataan Politik Negara Anggota FATF:
 - 11 Negara Mengapresiasi dan dukungan penuh untuk Indonesia.
 - 0 Negara Menolak atau Tidak Mempertimbangkan
 - 6 Negara Ingin Mendalami Capaian MER Indonesia
 - 1 Negara Netral
 - 19 Negara Tidak Menyampaikan Pendapat/Intervensi



Jalur *Fast-Track* untuk Proses Keanggotaan Indonesia, yaitu *Action Plan FATF*

SESI Pleno FATF pada 23 Februari 2023 yang dipimpin oleh Presiden FATF, Mr. T. Raja Kumar telah mencatat *High Level Commitment* Indonesia untuk FATF *Membership* dan mengadopsi hasil *Mutual Evaluation Review* (MER) Indonesia. Atas hasil yang baik itu dan mempertimbangkan sikap anggota FATF, FATF menyepakati bahwa Indonesia akan mendapatkan jalur *fast track* melalui penyusunan *Action Plan* dengan *timeline* yang singkat dan terukur agar Indonesia dapat diterima menjadi anggota FATF.

Indonesia berkomitmen penuh untuk melaksanakan *Action Plan* yang dimonitor oleh 8 negara *Contact Group*, yaitu Arab Saudi, Australia, Amerika Serikat, Perancis, India, Republik Rakyat Tiongkok (China), Jepang, dan Selandia Baru. *Contact Group* dan Indonesia telah menyepakati *Action Plan* terdiri dari peningkatan efektivitas pada aspek pengawasan terhadap pihak pelapor

8 Negara Contact Group Action Plan Monitoring:

- Arab Saudi
- Australia
- Amerika Serikat
- Perancis
- India
- Republik Rakyat Tiongkok
- Jepang
- Selandia Baru

(*Immediate Outcome* 3), aspek penyitaan, perampasan dan pemulihan aset hasil tindak pidana (*Immediate Outcome* 8) serta pada aspek pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal (*Immediate Outcome* 11).

PPATK bersama Lembaga Pengawas Pengatur, Aparat Penegak Hukum dan seluruh Kementerian/Lembaga terkait terus berkoordinasi dan bersinergi secara intensif dalam memenuhi data dukung baik dari sisi

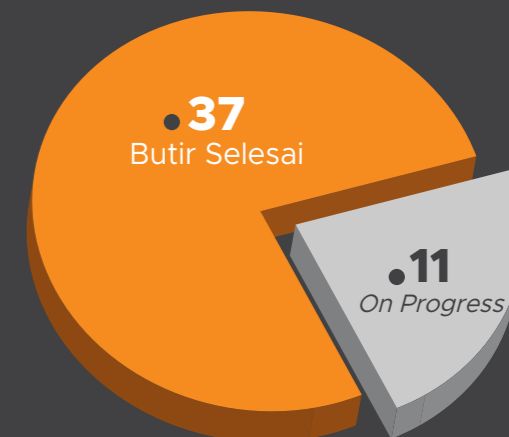
Action Plan Keanggotaan Penuh FATF untuk Indonesia

- 103 Peningkatan efektivitas pada aspek pengawasan terhadap pihak pelapor
- 108 Peningkatan efektivitas pada aspek penyitaan, perampasan dan pemulihan aset hasil tindak pidana
- 1011 Peningkatan efektivitas pada pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal

peraturan perundang-undangan maupun sisi efektivitas untuk memenuhi rencana aksi yang ditetapkan. Capaian data dukung Indonesia telah dilaporkan kepada *Contact Group* FATF pada tanggal 19 Mei 2023.

Berdasarkan Hasil Penilaian Mandiri (*Self-assessment*) dan *Evidence-Based* dalam pencapaian *Action Plan*, Indonesia mengkalkulasi bahwa telah berhasil melakukan capaian signifikan, yaitu sebesar 37 dari 48 butir *Action Plan*. Artinya, Indonesia telah mencapai

48 Butir *Action Plan* Keanggotaan FATF Indonesia*



*) Update Juni 2023

lebih dari 77% dari seluruh tujuan strategis dari *Action Plan*.

Contact Group FATF telah merilis *first review Action Plan* Indonesia yang menyatakan bahwa Indonesia telah membuat kemajuan positif dan *well-track* sesuai *timeline* yang disepakati. Capaian Indonesia dan hasil reviu ini telah dibahas bersama dengan seluruh anggota FATF pada Sidang Pleno FATF pada *closed session* yang baru saja dilaksanakan tanggal 19-23 Juni 2023.

Perkembangan Terkini Keanggotaan di FATF Berdasarkan Hasil FATF Plenary pada 19-23 Juni 2023

PADA FATF *Plenary* tanggal 19-23 Juni 2023, Indonesia menyampaikan *brief statement* yang menekankan penyelesaian *Action Plan* dan komitmen penuh jangka panjang Indonesia untuk meningkatkan kepatuhan standar internasional. Selanjutnya, tercatat ada 20 anggota FATF yang memberikan dukungan dan pengakuan capaian signifikan Indonesia terkait pemenuhan *Action Plan*, dimana sesi

plenary kemudian dilanjutkan secara *closed session* guna pemungutan suara mengenai status keanggotaan Indonesia apakah dapat langsung diterima sebagai anggota FATF di bulan Juni 2023 atau belum, yang hasilnya diketahui sebanyak 30 negara anggota FATF menyatakan setuju Indonesia langsung diterima sebagai anggota FATF, 4 negara lainnya menyatakan tidak setuju, 4 negara lainnya abstain dan 1 negara tidak bisa memberikan suara (Rusia).

Dikarenakan tidak ada konsensus dari anggota FATF mengenai hasil pembahasan keanggotaan Indonesia untuk diterima pada Bulan Juni 2023 (mengingat terdapat 4 negara tidak setuju), maka FATF menyepakati bahwa Indonesia akan masuk pada *Second Cycle Action Plan*. Terhadap hal tersebut, Indonesia akan terus berkomitmen melaksanakan seluruh butir *Action Plan* pada *cycle* kedua dengan *deadline* pada September 2023. Pada *cycle* kedua tersebut, jika seluruh butir *Action Plan* telah tercapai (*met*), maka Indonesia

dipastikan dapat segera diterima menjadi negara anggota penuh FATF pada FATF *Plenary* bulan Oktober 2023.

Harapan ini tentunya sesuai dengan pernyataan Presiden FATF pada penutupan FATF *Plenary* 23 Juni 2023 yang menyimpulkan Indonesia telah menunjukkan upaya dan komitmen yang serius dalam penguatan rezim APU-PPT yang sejalan dengan *Action Plan* sehingga dalam waktu yang cepat atau lambat Indonesia akan segera diterima menjadi anggota penuh FATF.



Resume Hasil FATF Plenary 19-23 Juni 2023

30

Negara Anggota FATF **SETUJU** Menerima Keanggotaan FATF Indonesia

4

Negara Anggota FATF **TIDAK SETUJU** Menerima Keanggotaan FATF Indonesia

4

Negara Anggota FATF **ABSTAIN**

1

Negara Anggota FATF **TIDAK BISA** Memberikan Suara (Rusia)

KEMAJUAN EFEKTIVITAS REZIM APU-PPT INDONESIA BERDASARKAN HASIL MER FATF INDONESIA

HASIL MER FATF Indonesia yang diadopsi pada FATF *Plenary* bulan Februari 2023 yang selanjutnya telah dipublikasikan pada April 2023. Hasil MER FATF Indonesia tersebut menunjukkan bahwa Indonesia telah memperoleh hasil (*rating*) yang baik dari FATF dan mencapai kemajuan dalam penegakan Rezim APU-PPT Indonesia.

Dari 40 Rekomendasi dalam aspek *Technical Compliance/TC* yaitu dari segi kebijakan dan ketentuan serta peraturan perundang-undangan, Indonesia memperoleh hasil yang baik sebagai berikut:

- Indonesia berhasil mendapatkan *Rating C (Compliant)* pada 6 Rekomendasi, *Rating LC (Largely Compliant)* pada 29 Rekomendasi, dan *Rating PC (Partially Compliant)* pada 5 Rekomendasi.
- Indonesia memperoleh C/LC pada 5 (lima)

rekomendasi kunci yaitu Rec 3 (Kriminalisasi TPPU), Rec 5 (Kriminalisasi TPPT), Rec 10 (*Customer Due Diligence*), Rec 11 (*Record Keeping*), dan Rec 20 (Pelaporan LTKM).

- Tidak ada *Rating Non-Compliant* (tidak patuh).

Sementara itu, dari 11 *Immediate Outcome (IO)* pada aspek penilaian efektivitas implementasi kerangka hukum dan kelembagaan suatu negara untuk mencapai penguatan penerapan APU-PPT, Indonesia memperoleh capaian yang baik yaitu:

- Indonesia mendapatkan kategori *Substantial* pada 4 IO, yaitu IO.1 (Risiko, Kebijakan dan Koordinasi), IO.2 (Kerja Sama Internasional), IO.6 (Intelijen Keuangan) dan IO.9 (Penyelidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme).
- Tidak ada *Rating Low* (Rendah).

Statistik Efektivitas Kemajuan Penegakkan Rezim APUPPT Indonesia

(Berdasarkan Hasil MER FATF)





STRATEGI NASIONAL Rezim Anti Pencucian Uang

GUNA meningkatkan efektivitas koordinasi antar lembaga terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, maka Komite TPPU menyusun suatu Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan TPPU dan TPPT (Stranas TPPU dan TPPT) dalam periode 5 Tahunan serta

menyusun rencana aksi untuk setiap tahunnya. Periode Strategi Nasional terakhir yaitu Strategi Nasional periode tahun 2020-2024.

Saat ini Komite TPPU telah merumuskan rencana aksi strategi nasional pencegahan dan pemberantasan TPPU-TPPT Tahun

PENYELARASAN PENYUSUNAN Recana Aksi Strategi Nasional

- **Defisiensi dan Tindakan aksi prioritas** yang disarankan oleh tim evaluasi MER FATF Indonesia
- **Hasil Penilaian Risiko Nasional dan Sektoral,** serta hasil evaluasi terhadap capaian rencana aksi Strategi Nasional pada periode 2022

2023. Penyusunan rencana aksi ini disusun oleh seluruh anggota Komite TPPU baik tim pelaksana maupun kelompok kerja dan diselaraskan dengan berbagai catatan antara lain:

- a. Defisiensi dan Tindakan aksi prioritas yang disarankan oleh tim evaluasi MER FATF



Indonesia melalui *Action Plan* Indonesia dalam rangka pemenuhan sebagai keanggotaan penuh di FATF

- b. Mempertimbangkan hasil penilaian risiko nasional dan sektoral, serta hasil evaluasi terhadap capaian rencana aksi Strategi Nasional pada periode 2022.

Rencana aksi strategi nasional TPPU-TPPT Tahun 2023 sebagaimana dimaksud telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Menko Polhukam Nomor 58 Tahun 2023 tanggal 12 Mei 2023, dengan total rencana aksi strategi nasional

sebanyak 64 aksi dan rencana aksi strategi nasional ini untuk dilaksanakan oleh seluruh Anggota Komite TPPU. Adapun penjelasan secara lengkap tiap-tiap strategi tercantum dalam Dokumen Rencana Aksi Strategi Nasional TPPU-TPPT Tahun 2023 sebagaimana terlampir.

Selama periode Januari - Juni 2023, Komite TPPU telah melakukan **pelaksanaan rapat Komite TPPU sebanyak 7 kali pertemuan**. Adapun pokok pembahasan dalam agenda rapat Komite TPPU tersebut mayoritas terkait isu-isu strategis seputar penanganan TPPU,

Tabel. Agenda Pelaksanaan Rapat Komite TPPU

| No. | Waktu Pelaksanaan | Kategori | Agenda Pembahasan |
|-----|-------------------------|-----------------------|---|
| 1. | 11-13 & 19 Januari 2023 | Tim Pelaksana | Pembahasan draf Rencana Aksi Strategi Nasional TPPU dan TPPT Tahun 2023 |
| 2. | 16 Februari 2023 | Komite TPPU | 1. Laporan Capaian dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Komite TPPU Tahun 2022 2. Konsolidasi Kesiapan Indonesia dalam Keanggotaan Penuh FATF saat Sidang Pleno FATF 2023 |
| 3. | 6 April 2023 | Tim Pelaksana | Koordinasi dan Konsolidasi Penanganan HA/HP PPATK pada Kementerian Keuangan |
| 4. | 10 April 2023 | Komite TPPU | 1. Koordinasi dan Konsolidasi Penanganan HA/HP PPATK pada Kementerian Keuangan 2. Penyusunan Langkah Strategi Tindak Lanjut dan Optimalisasi Penanganan HA/HP PPATK pada Kementerian Keuangan dan Aparat Penegak Hukum |
| 5. | 15 Mei 2023 | Komite TPPU Diperluas | 1. Penetapan Rencana Aksi Strategi Nasional TPPU TPPT PPSPM 2023 2. Diseminasi Pembentukan Tim Gabungan Penanganan TPPU terkait TP Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3. Arahan Penyelesaian dan Implementasi Action Plan Dalam Rangka Keanggotaan Penuh Indonesia di FATF |
| 6. | 5 Juni 2023 | Komite TPPU Terbatas | Perkembangan terkini persiapan PemRI untuk menghadiri plenary FATF Juni 2023, terutama implementasi progress report dari Action Plan Indonesia |
| 7. | 16 Juni 2023 | Komite TPPU Diperluas | Pembahasan Persiapan Pertemuan Plenary FATF Paris 19-23 Juni 2023 |

TPPT, dan PPSPM; pembahasan tanggapan atas draft MER FATF; penyelesaian implementasi *Action Plan* dalam rangka keanggotaan penuh Indonesia di FATF; serta konsolidasi dan

koordinasi penanganan HA/HP PPATK pada Kementerian keuangan.

Program Mentoring Berbasis Risiko 2023

DALAM rangka mengimplementasi kesungguhan Indonesia dalam memperkuat rezim APU-PPT, PPAK bersama para *stakeholders* terkait lainnya melaksanakan Program Mentoring Berbasis Risiko (Promensisko) dengan maksud untuk memberikan pemahaman risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme pada sektor-sektor tertentu. Di tahun 2023 ini, ada 2 tema yang diangkat dalam kegiatan tersebut sebagai tindak lanjut penyusunan SRA Korporasi dan pengkinian SRA NPO korporasi serta penyalahgunaan NPO sebagai sarana pendanaan terorisme.

Selain merupakan penghayatan SRA secara komprehensif, kegiatan tersebut merupakan salah satu *recommended action* yang harus dilakukan Indonesia berdasarkan hasil MER FATF 2022/2023 yang bertujuan untuk memberikan pemahaman risiko pencucian



uang dan pendanaan terorisme pada korporasi serta penyalahgunaan NPO sebagai sarana pendanaan terorisme.

Pelaksanaan Program Promensisko ini diharapkan agar dapat meningkatkan kapasitas penegak hukum, regulator, pihak pelapor, dan pihak terkait lainnya dalam melakukan

implementasi mitigasi risiko TPPU dan TPPT serta meningkatkan pemahaman tentang strategi dan penanganan perkara TPPU dan TPPT dengan pendekatan berbasis risiko. Selain itu, Promensisko juga diharapkan sebagai media untuk membentuk sinergi nasional antar instansi/kementerian/lembaga.

PROMENSISKO KETIGA dalam sejarah pelaksanaannya ini dilakukan pada Selasa-Rabu, 14-17 Maret 2023 lalu di Surabaya dengan beberapa fokus seperti:

- Internalisasi NRA TF & SRA NPO, Cegah & Deteksi TKM, Indikasi Penyalahgunaan NPO sebagai Pendanaan Terorisme, Pedoman dan Tata Cara Penerimaan & Pemberian Sumbangan oleh Ormas/ NPO, Cerdas Berdonasi dan Strategi Mitigasinya, Pedoman Tata Cara Pengawasan NPO & Strategi Pencegahan, serta Tipologi Penyalahgunaan NPO sebagai TPPT serta Strategi Penanganan NPO.**

KERJA SAMA DALAM PENINGKATAN KUALITAS DEMOKRASI INDONESIA

DALAM rangka mewujudkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan yang berintegritas pada pelaksanaan Pemilu Tahun 2024, PPATK telah melakukan serangkaian kegiatan. Salah satu hal yang perlu disorot dalam upaya tersebut ialah kerja sama dengan *stakeholder* terkait seperti KPU dan Bawaslu.

Kerja sama antara PPATK dan KPU sendiri telah berjalan baik sejak dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018 dan dilanjutkan Pemilu 2019. Bentuk kerja sama dimaksud dituangkan dengan bermacam hal seperti *sharing knowledge*, pertukaran data/informasi, terutama pemberian akses aplikasi SIDAKAM (Sistem Informasi Data Kampanye) *Online* dari KPU ke PPATK.

Cegah dan Berantas TPPU dalam Pemilihan Umum

Kerja Sama dengan *stakeholder* terkait seperti KPU dan Bawaslu

Sharing Knowledge, Pertukaran Data/Informasi, terutama pemberian akses aplikasi **SIDAKAM** (Sistem Informasi Data Kampanye) *Online* dari KPU ke PPATK



Berangkat pada pengalaman kerja sama sebelumnya di tahun 2022-2023 ini PPATK berusaha agar dapat memperoleh dukungan data dari KPU untuk dapat mempercepat dan menajamkan proses analisis. Dalam mewujudkan upaya tersebut, telah dilaksanakan rapat koordinasi antara kedua belah pihak yang bertujuan menyamakan visi dan menyeragamkan persepsi. Tahun 2023 ini PPATK juga melakukan pembaruan Nota Kesepahaman dengan Bawaslu dengan tujuan melakukan pengawasan rangkaian giat kepemiluan yang jujur, adil, berintegritas, dan akuntabel.

Dalam hal yang lebih teknis, PPATK membentuk Tim Kerja Analisis Kolaboratif terkait Pemilu dan Pilkada untuk menguatkan proses kerja antara PPATK dengan seluruh *stakeholder* yang terlibat dengan menyatukan bermacam data yang dikelola, serta *sharing experience* atas pelaksanaan kewenangan di tahun-tahun sebelumnya. Diharapkan model kerja sama ini mampu menyelesaikan bermacam persoalan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan tugas antar Lembaga yang beririsan.



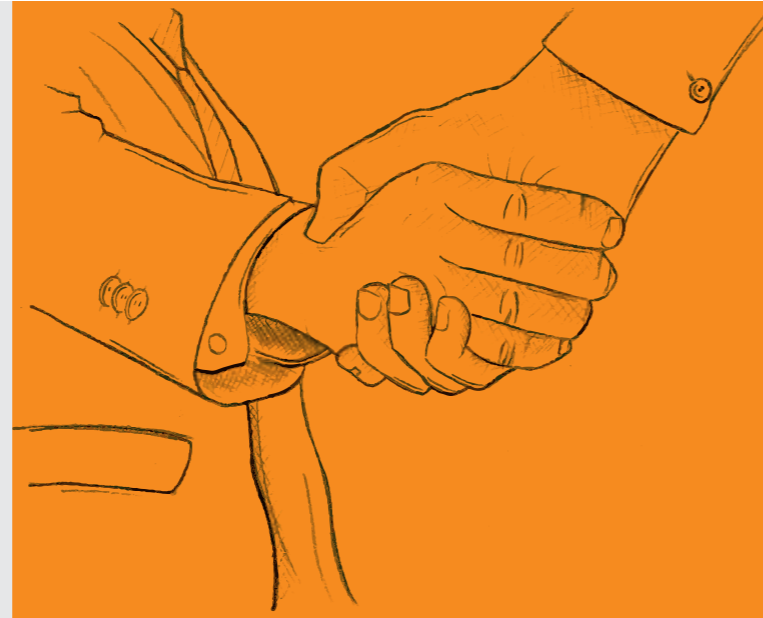
CAPAIAN MOU

Nota Kesepahaman

TINDAK pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme merupakan salah satu ancaman bagi stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan yang perlu ditangani secara sistematis dan komprehensif melalui sinergi dan kolaborasi antar kementerian/lembaga selaku para pemangku kepentingan dari rezim anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT), PPATK dapat melakukan kerja sama dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, baik dalam lingkup nasional maupun internasional.

Berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang TPPU, kerja sama nasional yang dilakukan PPATK dengan pihak terkait dituangkan dengan atau tanpa bentuk kerja sama formal.



KERJA SAMA FORMAL dilakukan melalui perjanjian tertulis dalam bentuk:

- Nota kesepahaman atau *memorandum of understanding*;
- Nota kesepakatan;
- Nota kesepakatan bersama;
- Perjanjian kerja sama atau *memorandum of agreement*; atau
- Bentuk perjanjian lain yang disepakati.

KERJA SAMA PERTUKARAN INFORMASI

Berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan pihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, meliputi :

- Instansi penegak hukum
- Lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan
- Lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
- Lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana pencucian uang

Sumber : Pasal 90 UU TPPU

Lebih rinci dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-12/1.03/PPATK/08/15 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Perjanjian Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana pencucian uang, meliputi:

- asosiasi pihak pelapor;
- perguruan tinggi;
- lembaga yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau berasal dari kekayaan/aset negara yang dipisahkan;
- lembaga penelitian; dan
- perusahaan media massa.

Selama periode bulan Januari – Juni 2023, telah dihasilkan 7 perjanjian kerja sama antara PPATK dengan kementerian/Lembaga lain, sebagai berikut:

1. Nota Kesepahaman antara PPATK dan Universitas Kristen Indonesia



Nomor NK-183/1.02/PPATK/1/2023 tanggal 3 Januari 2023 tentang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Pengabdian Masyarakat di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;

2. Nota Kesepahaman antara PPATK dan FEB Universitas Trisakti Nomor NK-184/1.02/PPATK/1/2023 tanggal 5 Januari 2023 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
3. Nota Kesepahaman antara PPATK dan Universitas Indonesia Nomor NK-185/1.02/PPATK/1/2023 tanggal 16 Januari 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
4. Nota Kesepahaman antara PPATK dan Universitas Azzahra Nomor NK-186/1.02/

PERJANJIAN KERJA SAMA antara PPATK dengan Kementerian/Lembaga lain (Semester 1 tahun 2023)

- Universitas Kristen Indonesia
- FEB Universitas Trisakti
- Universitas Indonesia
- Universitas Azzahra
- Badan Pengawas Pemilu
- Kejaksaan Agung
- Universitas Dr Soetomo

PPATK/1/2023 tanggal 31 Januari 2023 tentang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Pengabdian Masyarakat di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;

5. Nota Kesepahaman antara PPATK dan Badan Pengawas Pemilu Nomor NK-187/1.02/PPATK/1/2023 tanggal 7 Februari 2023 tentang Kerja Sama Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Kerja Sama Dalam Rangka Penindakan Pelanggaran dan Pengawasan

Dana Kampanye Pada Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Serentak Tahun 2024;

6. Nota Kesepahaman antara PPATK dan Kejaksaan Agung Nomor NK-189/1.02/PPATK/3/2023 tanggal 28 Maret 2023 tentang Kerja Sama Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan/atau Tindak Pidana Asal, Serta Tindak Pidana Pendanaan Terorisme; dan
7. Nota Kesepahaman antara PPATK dan Universitas Dr. Soetomo NK-190/1.02/PPATK/5/2023 tanggal 15 Mei 2023 tentang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Pengabdian Masyarakat di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Adapun secara garis besar, ruang lingkup kerjasama yang dilakukan antara PPATK dengan Kementerian/lembaga lain meliputi:

- a. Pengembangan kajian kelimuan
- b. Pertukaran Informasi
- c. Pendidikan atau pelatihan

- d. Pengembangan Teknologi Informasi
- e. Sosialisasi

Pelaksanaan kerja sama tersebut, diharapkan dapat memperkuat rezim APU-PPT. Bentuk kerjasama yang telah dilakukan PPATK bersama dengan Lembaga tersebut antara lain:

1. PPATK menerima kunjungan dari pihak Universitas Indonesia yang sedang melakukan kerjasama dengan Charles Darwin University (CDU) School of Law pada Rabu, 08 Februari 2023 di Ruang Rapat Besar, Gedung PPATK. Kunjungan ini merupakan serangkaian acara Short Course on Transnasional Organized Crime yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
2. PPATK memberikan sosialisasi kepada 1542 perwakilan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan 104 perwakilan Bawaslu Provinsi pada Rakornas Bawaslu di Surabaya, 7 Februari 2023; dan
3. Antara PPATK dan Kejaksaan Agung telah dilaksanakan pertukaran informasi, kerja sama penanganan perkara, penugasan Jaksa di PPATK, pendidikan atau pelatihan, sosialisasi, serta pengembangan sistem TI.



PENANDATANGANAN MOU DENGAN BAWASLU

PPATK dan Bawaslu melakukan penanda-tanganan Nota Kese-pahaman Bersama (MoU) pada 8 Februari 2023 di Surabaya.

Langkah ini merupakan salah satu bagian penting dari upaya PPKAT untuk meningkatkan sinergi dan kerja sama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan TPPU serta pencegahan dan penindakan pelanggaran dan pengawasan dana kampanye pada penyelenggaraan pemilu dan pemilihan presiden tahun 2024.



KOORDINASI DAN ASISTENSI

Penanganan Perkara Dugaan TPPU Dan TPPT

PPATK selaku *focal point* dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT) juga turut membantu penegak hukum melalui kegiatan asistensi dalam rangka memberikan dukungan penanganan perkara TPPU yang sedang dilakukan. Pemberian dukungan penanganan perkara (asistensi) dalam kurun waktu Januari-Juni 2023 telah dilaksanakan sebanyak 4 kali kegiatan atas 4 perkara yang meliputi tindak pidana pencucian uang, tindak pidana penipuan/ penggelapan, tindak pidana narkoba, dan tindak pidana korupsi.

Selain asistensi, PPATK juga membangun sinergi dengan *stakeholders* melalui kegiatan koordinasi guna mewujudkan rezim APU-PPT yang efektif dan efisien. Selama periode Januari-Juni 2023 PPATK telah melakukan koordinasi dengan kementerian/ Lembaga sebanyak 79 kali rapat koordinasi.



PENANGANAN DTTOT DAFTAR TERDUGA TERORIS DAN ORGANISASI TERORIS

SALAH satu bentuk upaya pencegahan tindak pidana pendanaan terorisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU TPPT) dilakukan melalui pencantuman identitas orang dan korporasi dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT), dan pemblokiran secara serta merta atas dana milik orang atau korporasi yang tercantum dalam DTTOT.

Pencantuman atau pembaruan pencantuman identitas orang dan Korporasi dalam DTTOT tersebut bersumber dari Pemerintah Republik Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Upaya pencantuman identitas individu dan korporasi/entitas ke dalam DTTOT sebagaimana diatur dalam UU TPPT merupakan upaya pencegahan tindak pidana pendanaan terorisme (*preventive measures*),

dan bukan upaya penegakan hukum tindak pidana pendanaan terorisme. Tindak lanjut dari pencantuman identitas individu dan korporasi/entitas ke dalam DTTOT adalah berupa pemblokiran secara serta merta terhadap seluruh dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh orang atau korporasi yang tercantum dalam DTTOT, atau yang dikenal dengan *freezing without delay* (*vide* Pasal 28 ayat (2) UU TPPT).

Dalam melaksanakan amanah UU TPPT, khususnya terkait penerapan pemblokiran serta merta terkait dana terduga teroris dan organisasi teroris, PPATK bersama-sama dengan Kementerian Luar Negeri, POLRI, BNPT, dan Mahkamah Agung telah menetapkan Peraturan Bersama tentang Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi Dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris dan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi.

Selama periode bulan Januari s.d. Juni 2023, telah terdapat 6 kali pencantuman identitas orang dan korporasi dalam DTTOT dan 1 kali perpanjangan pencantuman DTTOT, dengan rincian sebagai berikut:

- pencantuman yang bersumber dari PBB sebanyak 3 individu dan 1 entitas/korporasi;

- pencantuman yang bersumber dari Pemerintah sebanyak 4 individu dan 2 entitas/korporasi; dan
- perpanjangan pencantuman identitas orang dan korporasi dalam DTTOT dilaksanakan pada bulan April 2023.

06
kali

PENCANTUMAN IDENTITAS DTTOT

Periode Januari s.d. Juni 2023

Bersumber dari **PBB**



3

Individu

1

Entitas / Korporasi

Bersumber dari **PEMERINTAH**



4

Individu

2

Entitas / Korporasi

Perkembangan Proses Penetapan Rancangan Undang-Undang tentang **PERAMPASAN ASET TERKAIT TINDAK PIDANA**

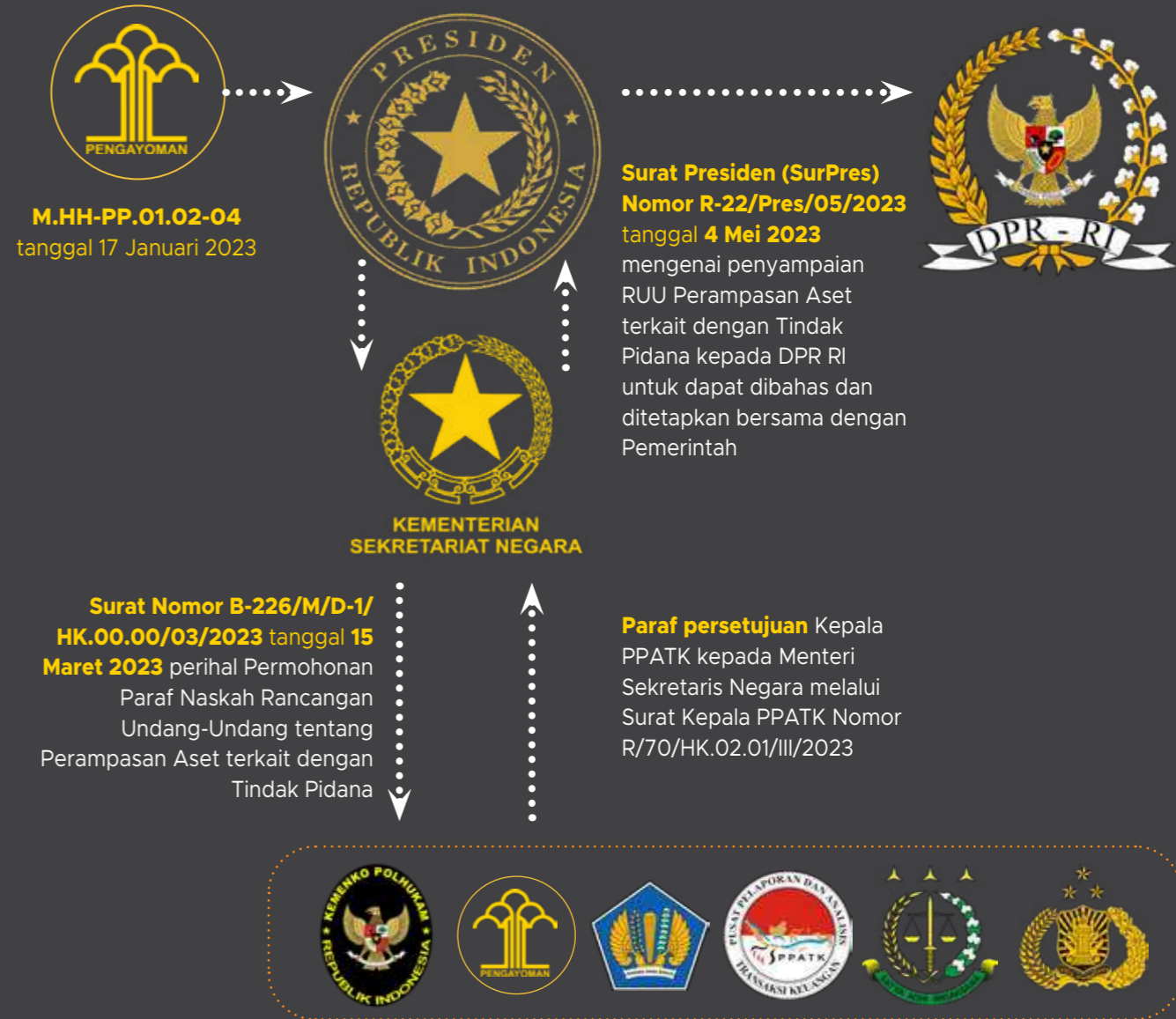
MENKUMHAM melalui Surat Nomor M.HH-PP.01.02-04 tanggal 17 Januari 2023 kepada Presiden telah menyampaikan dokumen RUU Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana kepada Presiden dengan tembusan kepada Menteri Sekretaris Negara, serta Naskah Akademik Penyelarasan Tahun 2022. Selanjutnya, Menteri Sekretaris Negara menindaklanjuti surat Menkumham dimaksud melalui penyampaian Surat Nomor B-226/M/D-1/HK.00.00/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 perihal Permohonan Paraf Naskah Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait dengan Tindak Pidana kepada 6 pimpinan K/L, yaitu Menkopolhukam, Menkumham, Menteri Keuangan, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala PPKATK.

Kepala PPKATK telah menyampaikan kembali RUU Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak

Pidana kepada Presiden yang telah diberikan paraf persetujuan kepada Menteri Sekretaris Negara melalui Surat Kepala PPKATK Nomor R/70/HK.02.01/III/2023 tanggal 17 Maret 2023.

Menteri Sekretaris Negara telah menerima 6 paraf persetujuan atas RUU Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana kepada Presiden. Selanjutnya, Presiden telah menyampaikan Surat Presiden (SurPres) Nomor R-22/Pres/05/2023 tanggal 4 Mei 2023 mengenai penyampaian RUU Perampasan Aset terkait dengan Tindak Pidana kepada DPR RI untuk dapat dibahas dan ditetapkan bersama dengan Pemerintah. Dalam SurPres dimaksud, Presiden telah menugaskan Menkopolhukam, Menkumham, Jaksa Agung, dan KAPOLRI baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut.

Update Proses Penetapan **RUU PERAMPASAN ASET TERKAIT TINDAK PIDANA** Periode Januari s.d. Juni 2023



PENELITIAN HUKUM DALAM RANGKA **PENYUSUNAN KAJIAN HUKUM TAHUN 2023**

DALAM setiap tahunnya, salah satu *annual program* dari Direktorat Hukum dan Regulasi adalah penyusunan Kajian Hukum. Kajian Hukum merupakan suatu telaahan/penelitian/kajian akademis terhadap isu-isu hukum tertentu di bidang APU-PPT.

Setelah tema-tema kajian hukum diputuskan untuk dilakukan pengkajian, tim dari Direktorat Hukum akan melakukan riset dalam rangka penyusunan Kajian Hukum tersebut. Selain riset dalam bentuk studi literatur, tim juga akan melakukan penelitian lapangan dalam bentuk wawancara kepada narasumber atau informan terkait isu yang menjadi objek kajian/penelitian/telaahan.

Hasil Wawancara Penelitian tersebut selanjutnya akan dijadikan sebagai salah satu data primer untuk dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan kajian hukum. Setelah pelaksanaan kegiatan tersebut, masing-masing tim akan melaporkan hasil wawancara penelitiannya tersebut ke dalam Laporan Hasil Wawancara Penelitian.



KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN

| | |
|---|-----|
| Anggaran PPATK | 92 |
| Komposisi SDM PPATK | 94 |
| Pengelolaan Barang Milik Negara..... | 96 |
| Festival Kreatif Anti Pencucian Uang..... | 100 |
| Penyusunan Strategi Komunikasi Penanganan Krisis Komunikasi di lingkungan PPATK..... | 101 |
| Trackam Hackaton | 102 |
| AML SMART Competition 2023..... | 104 |
| AML-CTF Office Battle 2023..... | 106 |
| Kompetisi Debat APUPPT | 108 |
| PPATK Mengajar..... | 110 |
| Membangun Vibrasi APUPPT | 112 |
| Pengaduan Masyarakat | 114 |
| Layanan Bantuan..... | 116 |
| Membangun Literasi APUPPT Melalui Perpustakaan dan AMLCFT Journal | 118 |
| Pelatihan APUPPT | 120 |
| Pengawasan Internal..... | 126 |

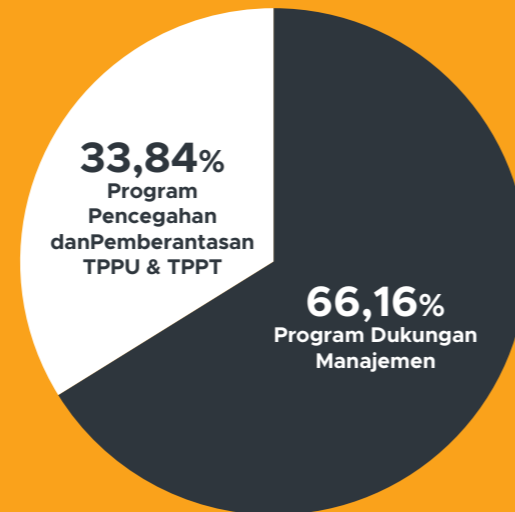
ANGGARAN PPATK

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK pada tahun 2023 berdasarkan DIPA PPATK nomor SP DIPA-078.01-0/2023 tanggal 30 November 2022 memiliki alokasi anggaran sebesar **Rp292.016.662.000,00** yang digunakan untuk membiayai dua program yaitu:

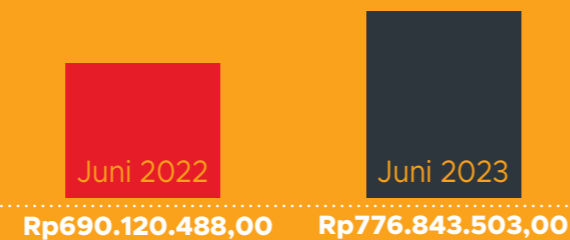
1. Program Dukungan Manajemen sebesar **Rp193.207.316.000,00**.
2. Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme sebesar **Rp98.809.346.000,00**.

Pada Semester I Tahun 2023 PPATK telah melakukan realisasi Pendapatan PPATK untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar **Rp776.843.503,00**. Sedangkan, realisasi Belanja PPATK untuk periode yang berakhir 30 Juni 2023 adalah sebesar **Rp129.086.160.210,00** atau mencapai **44,21%** dari alokasi anggaran sebesar **Rp292.016.662.000,00**.

STRUKTUR ANGGARAN Tahun 2023 **Rp292.016.662.000,00**

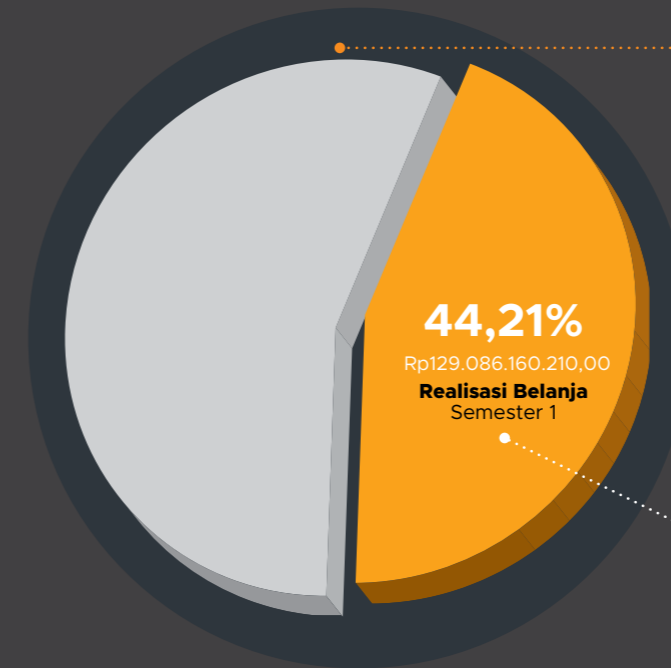


PERBANDINGAN PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK Y to Y



GRAFIK REALISASI ANGGARAN SEMESTER 1 TAHUN 2023

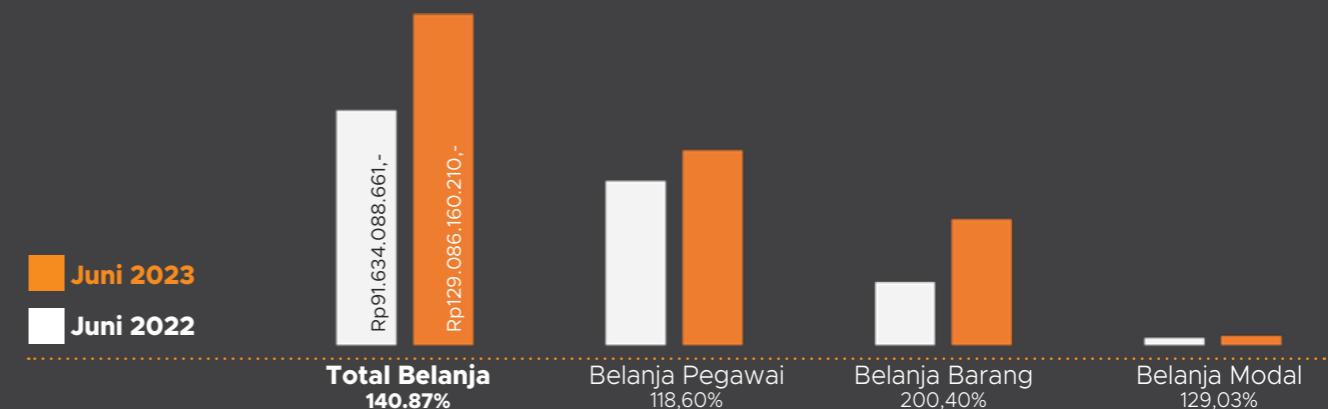
Rp292.016.662.000,00
Pagu 2023



RINCIAN REALISASI BELANJA:

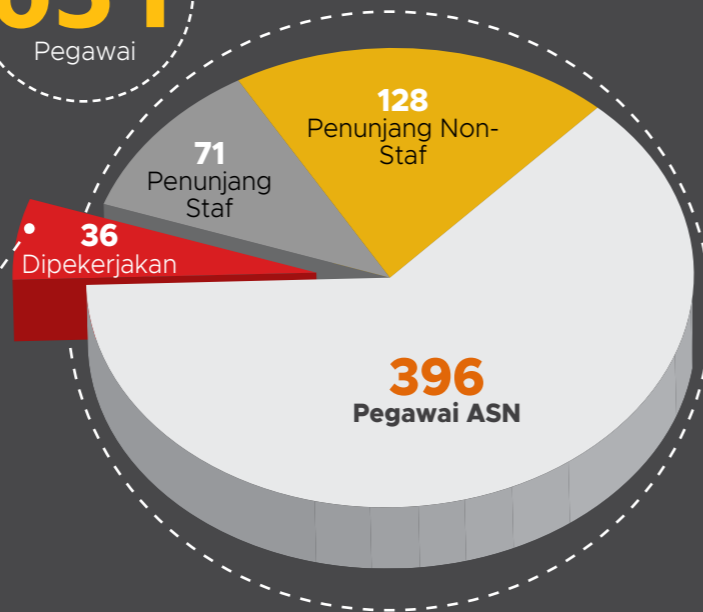


PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN Juni 2023 terhadap Juni 2022 (y to y)



KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA PPATK

631
Pegawai



Rincian Pegawai Dipekerjakan:

- 10 — Kepolisian Republik Indonesia
- 8 — PNS Kemenkumham
- 5 — Pegawai Bank Indonesia
- 5 — PNS Kemenkeu
- 4 — PNS Kejaksaan Agung
- 4 — PNS BPS

STATISTIK JABATAN FUNGSIONAL

| | | | |
|------------------------------------|-----|----------------------|---|
| Analisis Transaksi Keuangan | 133 | Perawat | 2 |
| Arsiparis | 41 | Statistisi | 2 |
| Pranata Komputer | 38 | Perencana | 2 |
| Analisis SDM Aparatur | 17 | Analisis Anggaran | 2 |
| Pranata Hubungan Masyarakat | 14 | Widyaiswara | 2 |
| Auditor | 13 | Dokter | 2 |
| Pengelola PBJ | 11 | Penatalaksana Barang | 2 |
| Analisis Pengelolaan Keuangan APBN | 8 | Perekayasa | 1 |
| Pengembang Teknologi Pembelajaran | 5 | Dokter Gigi | 1 |
| Pustakawan | 3 | Mangala | 1 |



PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

Perubahan Rencana Kebutuhan BMN Tahun 2023

PPATK telah melaksanakan perubahan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) untuk Tahun Anggaran 2023. Penelaahan terhadap perubahan RKBMN 2023 telah dilaksanakan pada tanggal 10 April 2023 yang disetujui Dirjen Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu melalui surat Menteri Keuangan Nomor: S-402/MK.6/2023 tanggal 19 Juni 2023.

Penatausahaan BMN

PPATK berkomitmen terus melaksanakan penatausahaan BMN yang tertib fisik, tertib administrasi, dan tertib hukum. Kegiatan penatausahaan BMN pada PPATK didukung oleh aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN). PPATK juga merupakan salah satu kementerian/lembaga yang terpilih untuk mengikuti *pilot project* penggunaan aplikasi SIMAN versi *website* Kementerian Keuangan yang direncanakan

akan diluncurkan pada semester II tahun 2023. Selain itu, PPATK juga sedang dalam upaya mengimplementasikan Aplikasi Mitra Instansi yang merupakan aplikasi penatausahaan sertipikat tanah dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Kegiatan penatausahaan BMN yang telah dilaksanakan pada semester I tahun 2023 antara lain penyusunan laporan BMN tahun 2022 *Unaudited* dan *Audited*, penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN (Wasdal BMN) tahun 2022, rekonsiliasi data pengguna perangkat kerja, dan juga pelaksanaan penetapan status penggunaan BMN sebagai wujud tertib administrasi BMN sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014. Kegiatan penatausahaan BMN selalu berkolaborasi dengan semua pihak baik pengguna dan pengelola BMN dalam rangka meningkatkan kualitas pencatatan aset.

Pengamanan BMN (Asuransi BMN 2023)

PPATK juga berkomitmen melakukan pengamanan BMN sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Sebagai salah satu langkah pengamanan fisik BMN PPATK adalah melakukan pengasuransian bangunan gedung pada PPATK. Pada tahun 2023, PPATK telah mendaftarkan asuransi terhadap 12 gedung yang terdiri dari 1 gedung pada Kantor Pusat PPATK dan 11 gedung pada Pusdiklat APUPPT dengan premi sebesar Rp437.373.311,00.

Pemindahtanganan dan Penghapusan BMN

Selama semester I tahun 2023, PPATK telah melaksanakan beberapa kali pemindahtanganan dan penghapusan terhadap BMN yang sudah tidak digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi PPATK. Adapun pemindahtanganan tersebut antara lain:

| No | Nama Kegiatan Pemindahtanganan | Tanggal Lelang | Nilai Laku (Rp) |
|----|---|----------------|-----------------|
| 1 | Lelang Paket Peralatan Kantor sejumlah 155 Unit | 2 Maret 2023 | 71.000.000,00 |
| 2 | Lelang Paket Kursi Besi Metal sejumlah 200 Unit | 13 Maret 2023 | 27.212.411,00 |
| 3 | Lelang Bongkaran Gedung Hasil Renovasi | 30 Maret 2023 | 72.999.999,00 |
| 4 | Lelang 10 Unit Kendaraan Dinas (Laku 9 unit) | 08 Juni 2023 | 55.583.000,00 |
| | Sedan dengan NUP 1, 3, 4, 5 | | 55.583.000,00 |
| | Jeep dengan NUP 2, 5 | | 63.533.000,00 |
| | Station Wagon dengan NUP 1, 2 | | 44.803.000,00 |
| | Sepeda Motor dengan NUP 1 | | 45.000.000,00 |
| | | | 54.750.000,00 |
| | | | 72.086.000,00 |
| | | | 73.900.000,00 |
| | | | 4.261.000,00 |

Total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Pemindahtanganan BMN pada PPATK selama semester I tahun 2023 adalah Rp640.711.410,00



Pemanfaatan BMN

Pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023, telah dilaksanakan penandatanganan kontrak Pemanfaatan BMN yaitu perpanjangan sewa ATM BRI pada gedung kantor PPAK dengan perjanjian Nomor : PERJ-01/PL.03.03/PPATKNI/2023.

Perjanjian sewa ini adalah untuk jangka waktu penggunaan selama 1 tahun sesuai dengan persetujuan sewa dalam surat Menteri Keuangan Nomor : S-68/MK.6/KNL.0704/2023 tanggal 28 Maret 2023. Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diperoleh dari kegiatan pemanfaatan BMN ini adalah sebesar Rp21.517.000,- (dua puluh satu juta lima ratus tujuh be/as ribu rupiah) yang telah disetorkan langsung ke Kas Negara pada tanggal 11 April 2023.

Indeks Pengelolaan Aset (IPA)

Hasil pengukuran indikator kinerja pengelolaan BMN juga disebut sebagai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) dilakukan oleh Kementerian Keuangan sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 127/KM.6/2022.

Pada tahun 2022, PPAK mendapatkan penilaian IPA dengan indeks 3,42 dari maksimal indeks 4. Adapun indeks tersebut mengukur sasaran strategis berupa pengelolaan BMN yang akuntabel dan produktif; kepatuhan pengelolaan BMN terhadap peraturan perundang-undangan; pengawasan dan pengendalian BMN yang efektif; serta administrasi BMN yang andal.



FESTIVAL KREATIF ANTI PENCUCIAN UANG

PPATK kembali menyelenggarakan Festival Kreatif Anti Pencucian Uang yang memperlombakan dua jenis bidang yakni Lomba Poster dan Lomba Film Pendek. Tema yang diusung kali ini adalah terkait pencucian uang yang masih memiliki korelasi dengan tema Gerakan Nasional 21 Tahun APUPTT yakni "Jaga Bumi, Jaga NK21". Penyelenggaraan kegiatan ini dimulai dari Tanggal 26 Juni hingga 27 Oktober 2023 sebagai hari penganugerahan pemenang.

Diharapkan melalui kegiatan ini dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat terutama generasi muda dalam mendukung Gerakan Anti Pencucian Uang di Indonesia, melalui peningkatan pemahaman yang komprehensif dalam bentuk karya seni Poster dan Film Pendek, sebagai platform edukasi berkelanjutan. Karya para pemenang akan dijadikan sebagai media edukasi kreatif untuk



disampaikan kepada publik secara luas melalui kanal dan jejaring publikasi yang dikuasi oleh PPATK. Para pemenang akan mendapatkan total hadiah puluhan juta rupiah.

PENYUSUNAN STRATEGI KOMUNIKASI PENANGANAN KRISIS KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PPATK

TINGGINYA pemberitaan serta perhatian publik terhadap PPATK menjadikan potensi Lembaga akan terjadinya krisis reputasi semakin meningkat. Untuk itu, guna mengantisipasi terjadinya krisis yang semakin liar, PPATK melalui Biro Umum melakukan penyusunan Peraturan tentang Strategi Komunikasi Penanganan Krisis di Lingkungan PPATK. Peraturan ini telah disahkan dengan nomor 7 tahun 2023. Diharapkan

melalui penerapan peraturan ini dapat menjadi peraturan yang mengikat bagi PPATK dalam mengantisipasi dan menangani krisis yang akan terjadi di kemudian hari.



TRACKAML HACKATHON: MENDORONG INOVASI CERDAS APUPPT

DALAM rangka memperingati Gerakan Rezim APUPPT Indonesia ke-21 dan lahirnya PPAK pada 17 April 2022, PPAK berkomitmen dalam pemberantasan tindak pencucian uang dan terorisme. Kegiatan TrackAML Hackathon yang diselenggarakan PPAK pada Mei 2023 mengusung tema yang berkaitan dengan *Artificial Intelligence (AI)* dalam mendorong Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Tujuan dari acara TrackAML Hackathon 2023 ini adalah untuk menjangring ide atau inovasi di bidang teknologi untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber data alternatif di luar laporan transaksi keuangan yang dikirimkan Pihak Pelapor ke PPAK untuk mendeteksi potensi terjadinya kejahatan di bidang



keuangan dalam mendukung rezim APUPPT bekerja sama dengan mahasiswa, pihak pelapor, dan instansi pemerintah.

TrackAML Hackathon diikuti oleh 49 tim, termasuk mahasiswa, pihak pelapor, dan instansi pemerintah diantaranya Kementerian Keuangan, Arsip Nasional Republik Indonesia, PT Bank Tabungan Negara, Institut Teknologi Sepuluh November, Universitas Gunadarma, dan IPB University. Setelah seleksi administrasi, 16 tim masuk tahap uji coba daring dan terpilih 10 tim yang masuk ke babak final untuk pembinaan dan presentasi *output*.



Harapannya, *output* dari kegiatan ini akan terus dikembangkan oleh PPAK khususnya Pusat Teknologi Informasi. Hal ini akan mendukung pelaksanaan *action plan* keanggotaan



Indonesia di FATF dan meningkatkan investasi untuk ASEAN sebagai pusat pertumbuhan global.

GERAKAN NASIONAL 21 TAHUN REZIM APUPPT INDONESIA **AML SMART COMPETITION 2023**

PPATK melalui Gerakan Nasional 21 tahun Rezim APUPPT Indonesia telah melakukan beragam rangkaian kegiatan menggaet keterlibatan masyarakat dalam semarak ulang tahun PPATK yang ke 21 tahun.

Guna menanamkan semangat Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sehingga mampu memancing daya kritis generasi muda, telah dilaksanakan sebuah kegiatan yang mampu menarik perhatian dan keikutsertaan generasi muda dimana kegiatan tersebut diadakan sebagai wadah bagi generasi muda untuk menambah wawasan serta meningkatkan pengetahuan mereka terkait APUPPT.

Oleh karena itu PPATK berinisiatif menyelenggarakan kegiatan dengan sasaran peserta yaitu para pelajar SMA/SMK diseluruh Indonesia dalam sebuah rangkaian kegiatan "AML Smart Competition 2023".

Kegiatan ini diikuti oleh 52 SMA dan sederajat yang terdiri dari 43 tim Sekolah Menengah Atas (SMA) dan 9 tim Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan proses *Preliminary Test* pada 16 Mei 2023 menghasilkan 9 sekolah yang lolos ke babak semifinal.

Pelaksanaan semifinal dan final dilaksanakan pada 13 Juni 2023 dengan menghasilkan pemenang sebagai berikut:

- Juara 1 : SMAN Negeri 6 Bogor (920 poin)
- Juara 2 : SMKN 13 Jakarta (600 poin)
- Juara 3 : SMAN 107 Jakarta (330 poin)

Pelaksanaan kegiatan ini juga tidak lepas dari dukungan 5 mitra *stakeholder* PPATK yang terdiri dari Bank Sinar Mas, Bank IBK, Bank of China, Bank BTN dan Bank Mandiri.



GERAKAN NASIONAL 21 TAHUN REZIM APUPPT INDONESIA **AML-CTF OFFICE BATTLE 2023**

PPATK dengan Gerakan Nasional 21 tahun Rezim APUPPT Indonesia telah menyelenggarakan kegiatan lomba AML CTF OFFICE BATTLE. Kegiatan ini merupakan ajang kompetisi sebagai wadah bagi pihak pelapor untuk menambah pengetahuan, meningkatkan minat pihak pelapor dalam pemahaman dan penguatan sistem terkait rezim APUPPT yang ditujukan bagi kalangan pihak pelapor di Indonesia.

Peserta yang terlibat terdiri dari pihak pelapor yang meliputi PJK di bawah pengawasan Bank Indonesia, PJK di bawah pengawasan OJK, dan Penyedia Barang dan Jasa (PBJ).

Kegiatan ini dilaksanakan dari tanggal 10 April 2023 s.d. 14 Juni 2023 yang diawali dengan registrasi peserta (10 April s.d. 8 Mei 2023), lalu pelaksanaan *Preliminary Test* pada

17 Mei 2023, Pengumuman semifinal pada 23 Mei 2023, dan diakhiri dengan puncak acara semifinal, final, dan pengumuman juara pada tanggal 14 Juni 2023 di Pusat pendidikan dan pelatihan APUPPT PPATK, Depok.

Kegiatan ini diikuti oleh 79 tim dari beragam pihak pelapor dengan dominasi 46 tim dari PJK Bank, dengan proses *Preliminary Test* pada 17 Mei 2023 yang menghasilkan 9 tim yang lolos ke babak semifinal.

Pelaksanaan semifinal dan final telah menghasilkan pemenang sebagai berikut:
Juara 1 : Tim PT Bank Mandiri (1650 poin)
Juara 2 : Tim PT BCA (960 poin)
Juara 3 : Tim PT Bank Sinarmas (585 poin)

Pelaksanaan kegiatan ini juga tidak lepas dari dukungan 5 mitra *stakeholder* PPATK yang terdiri dari Bank Sinar Mas, Bank IBK, Bank of China, Bank BTN dan Bank Mandiri.



GERAKAN NASIONAL 21 TAHUN REZIM APUPPT INDONESIA

KOMPETISI DEBAT APUPPT

PPATK mengadakan Kompetisi Debat Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia Tahun 2023 dalam rangka Gerakan Nasional 21 tahun Rezim APUPPT Indonesia pada tanggal 20 Maret s.d. 8 Juni 2023.

Kompetisi ini dilaksanakan menyoar kalangan perguruan tinggi tingkat S1 di seluruh Indonesia, yang diawali dengan penerimaan karya ilmiah dari para peserta, tercatat terdapat 23 karya ilmiah yang dikirimkan dari 21 perguruan tinggi se-Indonesia. Hasil penilaian atas seluruh karya yang masuk dihasilkan 6 karya tulis terbaik yang selanjutnya masuk pada kompetisi debat pada tanggal 7-8 Juni 2023.

Hasil kompetisi debat tersebut dihasilkan daftar pemenang sebagai berikut:
Juara 1 : Universitas Sumatera Utara
Juara 2 : Universitas Gadjah Mada
Juara 3 : Universitas Andalas

Pelaksanaan kegiatan kompetisi debat ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk :

1. Menyosialisasikan semangat anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dalam rangka pecegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT.

2. Meningkatkan kesadaran bahaya dan ancaman TPPU dan TPPT bagi Indonesia dan dunia Internasional.
3. Meningkatkan kemampuan mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa dalam memahami tantangan pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT.
4. Merangsang kreatifitas generasi milenial dalam Menumbuhkan budaya anti pencucian uang dan pendanaan terorisme.



PPATK MENGAJAR

MEMBANGUN PERAN DAN KESADARAN GENERASI MUDA
MENDUKUNG REZIM APUPPT

UPAYA pencegahan tindak pidana pencucian uang harus menysasar seluruh lini di masyarakat, pelajar dan mahasiswa adalah potensi emas masa depan Indonesia yang harus dijaga dari beragam infiltrasi bentuk kejahatan, termasuk kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Merujuk peta risiko pada NRA TPPU, pelajar dan mahasiswa adalah kalangan yang beresiko tinggi terkena *impact* kejahatan ekonomi ini. Oleh karena itu, PPATK telah melaksanakan kegiatan edukasi publik kepada generasi muda dalam program PPATK Mengajar dengan sasaran pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat serta program Diskusi Kontemporer untuk kalangan mahasiswa perguruan tinggi.

Semester satu tahun 2023 ini, PPATK telah melaksanakan program PPATK Mengajar di 6 Sekolah perwakilan daerah Medan, Depok, dan Tangerang dengan jumlah keterlibatan peserta sebanyak **750 peserta**. Program

| No | Lokasi Kegiatan | Peserta |
|----|------------------------------|---------|
| 1 | SMAN 6 Medan | 120 |
| 2 | SMAN 1 Pancur Batu | 130 |
| 3 | SMAN 1 Depok | 140 |
| 4 | SMAN 3 Depok | 130 |
| 5 | SMAN 1 Tangerang | 97 |
| 6 | SMAN 2 Tangerang | 133 |
| 7 | DISKUSI KONTEMPORER PKN STAN | 204 |

Diskusi Kontemporer telah dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2023 yang bekerjasama dengan Politeknik Keuangan Negara STAN dengan jumlah keterlibatan peserta sebanyak **204 peserta**.

Kedua program edukasi tersebut diharapkan dapat melahirkan generasi muda yang paham dan *aware* terhadap bahaya yang timbul dari kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme di masyarakat.



MEMBANGUN VIBRASI APUPPT

MELALUI JEJARING KERJASAMA DAN EDUKASI PUBLIK

KEBERADAAN rezim anti pencucian uang yang efektif di Indonesia, merupakan kebutuhan nyata dalam membantu stabilitas pembangunan ekonomi dan penegakan hukum. Rezim ini akan dapat berjalan secara efektif bilamana seluruh elemen dan komponen yang ada di masyarakat bersama-sama bahu membahu dalam membangun dan mengembangkannya.

PPATK sebagai *leading sector* dalam membangun rezim anti pencucian-uang memerlukan dukungan dari berbagai pihak.

Sebagaimana arahan Bapak Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, pengaruh PPATK merupakan vibrasi gaungan APUPPT di Indonesia. Vibrasi tersebut akan menggetarkan banyak pihak secara personal maupun organisasi agar rezim APUPPT di Indonesia dapat terus berjalan dan bergerak maju.

Jejaring kerjasama yang kuat merupakan modal dasar bentuk vibrasi tersebut. Kemitraan yang kuat melalui kerjasama dan koordinasi melalui audiensi Pemberdayaan Kemitraan pada saat ini dan di masa depan diharapkan

akan memunculkan MITRA-PPATK yang menjadi kepanjangan tangan dan bersama-sama dengan PPATK terus berjuang dalam mencegah dan memberantas pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia.

Kemitraan terus kita bangun dalam membangun iklim pencegahan TPPU dan TPPT di Indonesia melalui beragam bentuk kolaborasi kegiatan seperti kegiatan PPATK Mengajar, diskusi kontemporer, gerakan nasional 21 tahun APUPPT, sosialisasi, kerjasama media, audiensi dan bentuk edukasi publik lainnya yang tercatat selama semester satu tahun 2023 sebanyak 25 kegiatan kemitraan yang telah dilaksanakan dengan total *expose* sebesar **77.757 audience**.

| KEGIATAN | | Audience |
|---------------------|--------|----------|
| Nama | Jumlah | |
| PPATK MENGAJAR | 6 | 750 |
| DISKUSI KONTEMPORER | 1 | 204 |
| AUDIENSI | 10 | 37 |
| KUNJUNGAN SISWA | 3 | 203 |
| JADI TAHU | 3 | 76.534 |
| KERJASAMA MEDIA | 2 | 29 |

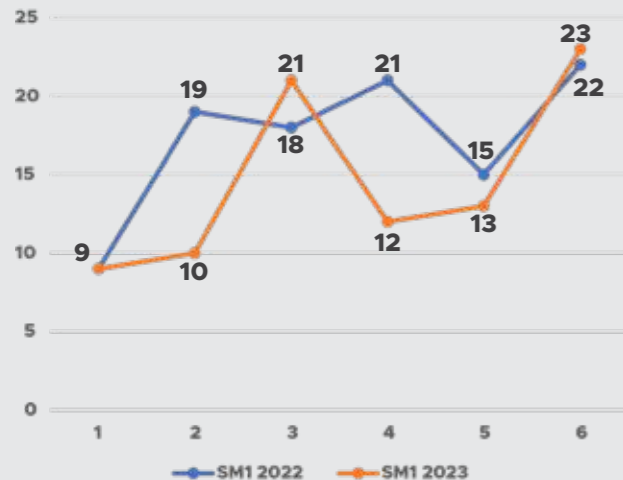


PENGADUAN MASYARAKAT

MEMBANGUN MASYARAKAT PEDULI APUPPT

SALAH satu sumber informasi yang digunakan oleh PPATK berasal dari laporan pengaduan masyarakat (Dumas). Laporan Dumas berisi pengaduan dari masyarakat terkait dugaan tindak pidana pencucian uang, dugaan tindak pidana pendanaan terorisme, dan dugaan tindak pidana lainnya.

PPATK menerima sebanyak **88 laporan** pengaduan selama semester 1 tahun 2023. Dibandingkan dengan laporan pengaduan masyarakat semester 1 tahun 2022 sebanyak **104 laporan**, terdapat penurunan jumlah laporan sebesar **15,38%**.

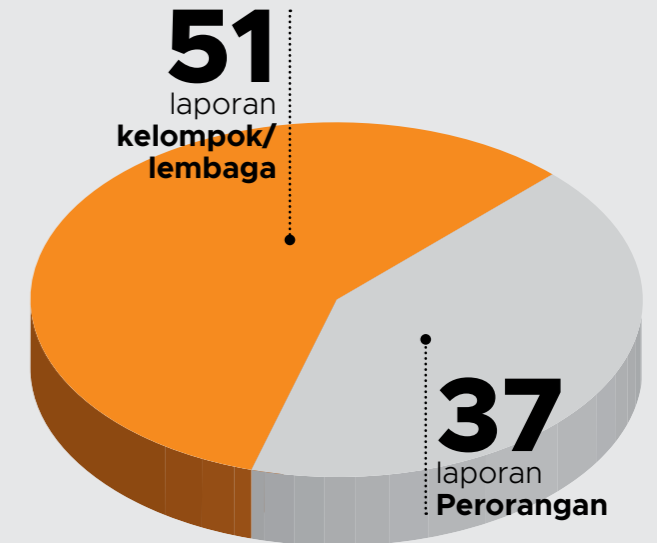


Laporan Dumas dapat disampaikan secara elektronik dan nonelektronis. Laporan Dumas secara elektronik dapat disampaikan melalui sistem aplikasi Dumas dan surat elektronik. Laporan Dumas secara non-elektronis disampaikan melalui surat atau tatap muka.

Pada periode bulan Januari 2023 hingga Bulan Juni 2023 terdapat 88 pengaduan masyarakat yang diterima oleh Tim Pengaduan Masyarakat melalui sistem. Terdapat 37 laporan yang berasal dari perorangan dan 51 laporan yang berasal dari kelompok atau lembaga.

Penerimaan pengaduan masyarakat tertinggi terjadi pada bulan Maret 2023 dengan jumlah sebanyak 21 laporan.

Laporan Pengaduan Masyarakat terdiri dalam delapan Kategori Laporan. Mayoritas pengaduan masyarakat termasuk dalam kategori pengaduan (72,73%). Adapun kategori terbesar kedua terkait dengan somasi (9,09%).



Statistik Laporan Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Afiliasi Masyarakat

| | | |
|--------|----|--|
| 72,73% | 64 | Laporan Pengaduan |
| 9,09% | 8 | Laporan Somasi |
| 5,68% | 5 | Laporan Tembusan |
| 5,68% | 5 | Laporan Perlindungan Hukum |
| 3,41% | 3 | Laporan Informasi Penerimaan Dana |
| 1,14% | 1 | Tidak Relevan |
| 1,14% | 1 | Permohonan Pembukaan Blokir Rekening |
| 1,14% | 1 | Penghentian Sementara Transaksi Keuangan |

LAYANAN BANTUAN

PINTU GERBANG PPAK YANG AKUNTABEL DAN TRANSPARAN

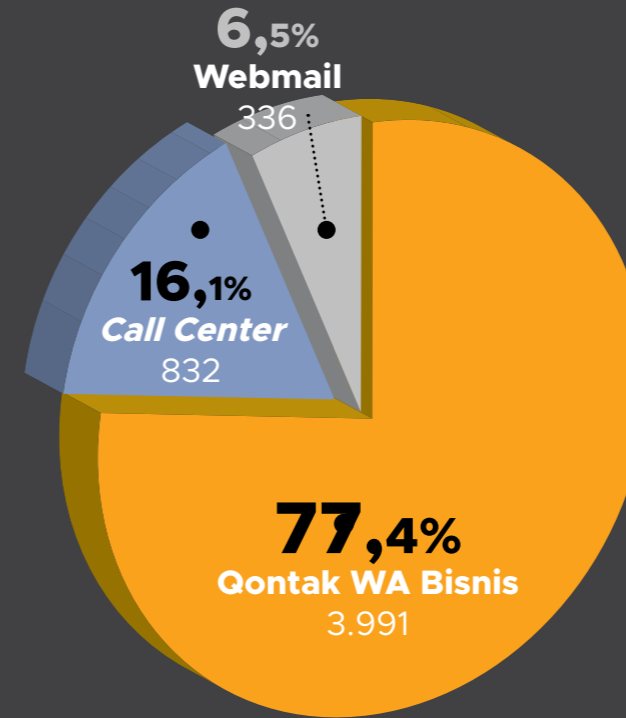
LAYANAN Bantuan PPAK hadir menjembatani kebutuhan masyarakat akan informasi terkait PPAK secara langsung melalui beragam kanal komunikasi langsung yang disediakan dalam aplikasi layanan bantuan PPAK.

Aplikasi Layanan Bantuan sebagai sarana elektronik bagi publik untuk mengakses layanan publik yang disediakan oleh PPAK. Terdapat 3 aplikasi layanan bantuan yang disediakan oleh PPAK meliputi **Qontak** (Whatsapp Bisnis), **Hodu CC** (Call Center), dan **Webmail** (E-mail).

Total percakapan yang ditangani tim layanan bantuan melalui **Qontak** (Whatsapp Bisnis) selama periode Bulan Januari 2023 hingga Bulan Juni 2023 adalah **3.991 percakapan** dengan rata-rata waktu penyelesaian isu adalah 20 jam 11 menit 3 detik. Jumlah percakapan paling tinggi terjadi pada Bulan April 2023 dengan jumlah percakapan sebanyak 1473 percakapan yang disebabkan karena adanya peningkatan registrasi pihak pelapor.

Call Center melalui sistem **Hodu Call Center** telah melayani **832 panggilan telepon** selama periode semester 1 tahun 2023 ini, yang berasal dari pihak Penyedia Jasa Keuangan (PJK), Penyedia Barang dan Jasa (PBJ), Profesi, maupun yang terkait dengan pengaduan masyarakat/hubungan masyarakat. Frekuensi panggilan telepon paling tinggi terjadi pada Bulan Mei 2023 dengan jumlah sebanyak 177 panggilan.

Layanan bantuan melalui **webmail** juga telah menerima **336 E-mail** yang berasal dari pihak-pihak Penyedia Jasa Keuangan (PJK), Penyedia Barang dan Jasa (PBJ), Profesi, maupun yang terkait dengan pengaduan masyarakat/hubungan masyarakat selama semester 1 ini. Penerimaan tertinggi terjadi pada Bulan Mei 2023 dengan jumlah sebanyak 102 e-mail.



Qontak (Whatsapp Bisnis)

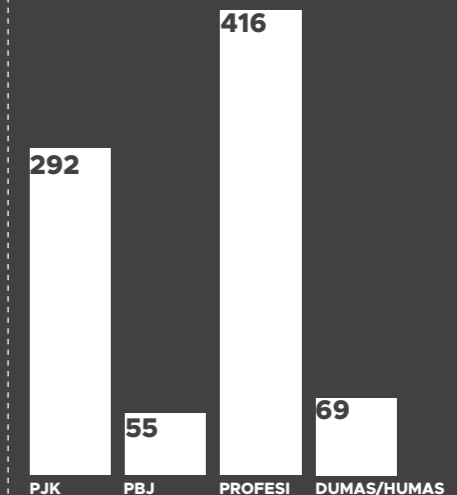
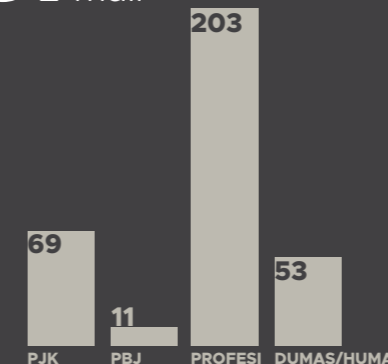
3.991 Percakapan
Rata-rata Waktu Penyelesaian Isu
20 jam **11** menit **3** detik

Hodu Call Center

832 panggilan telepon

Webmail

336 E-mail



MEMBANGUN LITERASI APUPPT

MELALUI PERPUSTAKAAN DAN AMLCFT JOURNAL

LITERASI Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT) adalah salah satu bagian dari bentuk edukasi masyarakat dalam rangka pencegahan pencucian uang di masyarakat.

Perpustakaan PPAK mengusung literasi APUPPT ini melalui layanannya baik dalam bentuk layanan perpustakaan konvensional terotomasi maupun layanan perpustakaan digital. Kini akses literasi APUPPT dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat melalui **PPATK DIGIPUS (Perpustakaan Digital PPAK)** yang dapat diakses melalui *smartphone* baik yang ber-*platform* Android dan IOS.

Katalog online Perpustakaan PPAK juga telah tersedia dalam bentuk **online public access catalogue - OPAC** yang dapat di akses melalui perpustakaan.ppatk.go.id.

STATISTIK PERPUSTAKAAN PPAK SEMESTER 1 TAHUN 2023

KOLEKSI MONOGRAFI PERPUSTAKAAN

4.204 judul
7.909 eksemplar

KOLEKSI DIGITAL PERPUSTAKAAN

5.564 judul

STATISTIK KUNJUNGAN PERPUSTAKAAN

173 kunjungan

SIRKULASI PEMINJAMAN KOLEKSI

238 peminjaman

PEMINJAMAN /DOWNLOAD KOLEKSI DIGITAL

565 judul

Di samping itu, literasi APUPPT juga dilakukan melalui pengembangan literasi karya tulis ilmiah melalui wadah **AML CFT Journal** sebagai bentuk cara memasyarakatkan diskursus APUPPT pada ranah pemikiran empiris dan akademis yang diharapkan dapat meningkatkan kontribusi masyarakat dalam mengembangkan literasi kajian APUPPT. AML CFT Journal telah terbit untuk edisi keduanya pada bulan Juni 2023 ini.

Kontribusi pengembangan karya ilmiah melalui AML CFT Journal ini dilakukan melalui *Open Journal System* yang dapat diakses oleh masyarakat pada journal.ppatk.go.id.

STATISTIK PENGELOLAAN AMLCFT JOURNAL SEMESTER 1 TAHUN 2023

26 naskah masuk
6 naskah terbit **2** naskah ditolak

Akses Artikel Tertinggi (View/Download)

805

ARTIKEL: *Kemungkinan Atas Digunakannya Hasil Analisis PPAK sebagai Alat Bukti pada Penanganan Perkara Pencucian Uang* | Hasan



PENGUNJUNG OPEN JOURNAL SYSTEM AMLCFT JOURNAL

| | |
|-----------|-------------|
| INDONESIA | 2877 |
| USA | 197 |
| SINGAPURA | 18 |
| INGGRIS | 17 |
| INDIA | 10 |
| BELANDA | 9 |
| PERANCIS | 7 |
| HONGKONG | 5 |
| FINLANDIA | 5 |

PELATIHAN APUPPT

PERKUAT *STAKEHOLDER* PPAK, PERKUAT REZIM APUPPT

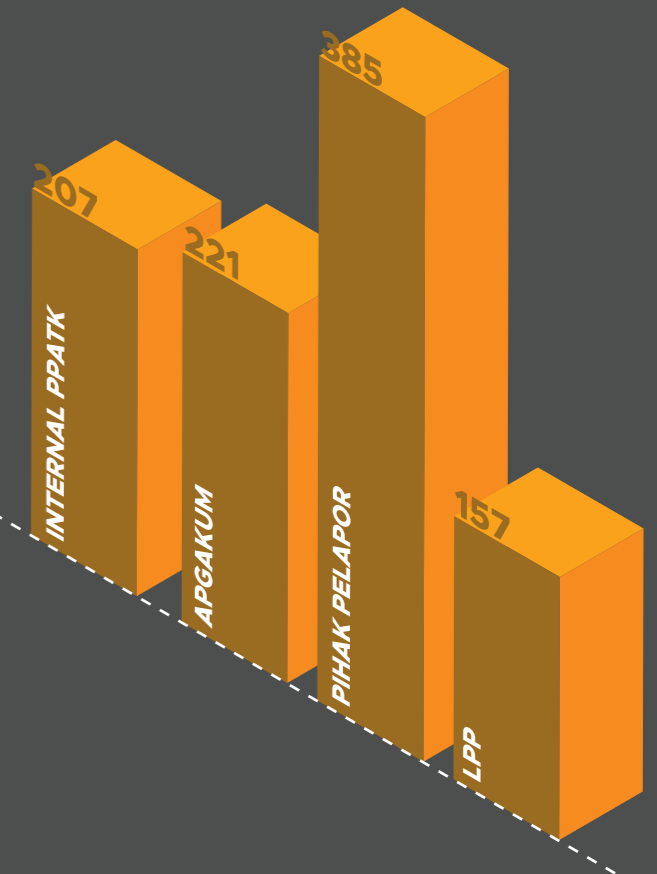
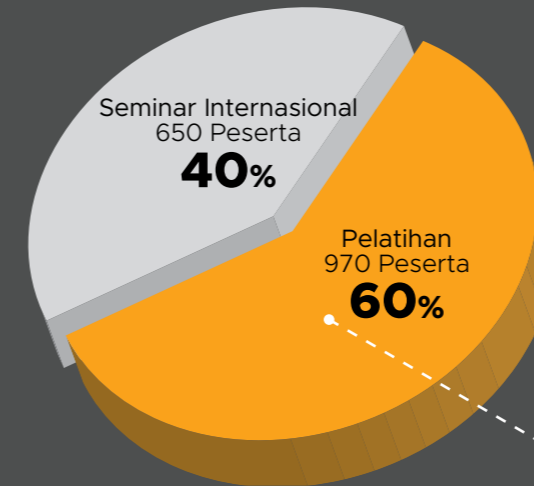
SESUAI upaya PPAK sambut tahun politik pada tahun 2023-2024, dalam rangka penguatan pemahaman TPPU dan TPPT melalui pelatihan. PPAK melalui Pusat Pendidikan Pelatihan APUPPT telah menyelenggarakan 28 pelatihan dan 1 seminar internasional pada Semester I tahun 2023 yang ditujukan bagi *stakeholder* PPAK yang terdiri dari Aparat Penegak Hukum, Lembaga Pengawas dan Pengatur, Pihak Pelapor dan Internal PPAK.

PPAK menggondong program Prioritas Nasional melalui penyelenggaraan 15 pelatihan bagi Aparat Penegak Hukum dengan total 450 peserta. Adapun realisasi penyelenggaraan pelatihan dan program prioritas nasional pada Semester I tahun 2023 sebagaimana ditunjukkan pada tabel di samping.

Selain itu, pada tanggal 17 April 2023 PPAK telah menyelenggarakan seminar internasional APUPPT dalam upaya meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan dalam rezim APU PPT dan menjalankan implementasi hasil rekomendasi MER FATF.

Seminar internasional dengan tema

| No | Stakeholder | Jumlah Penyelenggaraan | Peserta |
|----|---------------|------------------------|---------|
| 1 | Internal PPAK | 7 | 207 |
| 2 | Apgakum | 6 | 221 |
| 3 | Pelapor | 11 | 385 |
| 4 | LPP | 4 | 157 |
| | Total | 28 | 970 |



"Oversight And Asset Recovery on Green Financial Crimes And Transnational Laundering On High-Risk Predicate Crimes in Indonesia" dihadiri 650 peserta dari FIU negara lain, aparat penegak hukum, lembaga pengawas pengatur, dan pihak pelapor.





Kerja sama dalam rangka penyelenggaraan pelatihan juga telah dilakukan dengan beberapa *stakeholder* yang diperkuat dengan adanya Perjanjian Kerja Sama. Kerja Sama pada Semester I tahun 2023 adalah sebagai berikut:

| No | PKS | Mitra |
|----|-----------------------------------|---|
| 1 | Penyelenggaraan pelatihan bersama | BNN dan Pusbang DM BNN |
| 2 | Penyelenggaraan pelatihan "PNBP" | PT. Bank Sahabat Sampoerna |
| 3 | Kegiatan seminar internasional | Bank Jawa Barat dan Banten; Bank Jago; Bank Superbank |
| 4 | Kemitraan KPPU | KPPU |
| 5 | <i>Sharing Knowledge</i> | BSSN |

Salah satu kontribusi terhadap penerimaan negara bukan pajak (PNBP) PPATK di semester 1 tahun 2023 juga adalah melalui penyelenggaraan pelatihan dengan pihak pelapor PPATK yaitu PT. Bank Sahabat Sampoerna.

Penyelenggaraan pelatihan dengan mekanisme pembiayaan melalui PNBP tersebut telah berkontribusi penerimaan negara sebesar Rp64.080.000,- (enam puluh empat juta



delapan puluh ribu rupiah). Pelatihan tersebut diselenggarakan selama 2 hari dengan total 39 peserta. Pelatihan Penerapan APU PPT Bagi Bank Devisa tingkat lanjutan tersebut diselenggarakan pada tanggal 8 – 9 Juni 2023.

Perencanaan dan pengembangan program pelatihan telah menyusun beberapa kurikulum dan silabus yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan sebagai berikut:

Kurikulum

1. Kurikulum Pelatihan GoAML Internal
2. Kurikulum Pelatihan Identifikasi Risiko TPPT-PP
3. Kurikulum Pelatihan Pengawasan berbasis risiko TPPT LPP
4. Kurikulum Pelatihan Internalisasi NRA dan SRA bagi LPP
5. Kurikulum Teknik Analisis Tindak Pidana Pencucian Uang dari Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika
6. Kurikulum Pelatihan Pemulihan Aset dari Kejahatan Kehutanan dan LH
7. Kurikulum Pelatihan Pemulihan Aset dari Kejahatan Transnasional

8. Kurikulum Penerapan APUPPT bagi Bank Devisa
9. Kurikulum Audit Kepatuhan bagi Kemenkop

Silabus

1. Silabus Pelatihan ACL (Internal)
2. Silabus Pelatihan Identifikasi TKM
3. Silabus Pelatihan goAML (Internal)
4. Silabus Pelatihan Pelaporan Transaksi Keuangan (Blended)
5. Silabus Pelatihan Pelaporan Transaksi Keuangan (Klasikal)
6. Silabus Pelatihan Penanganan TPPU
7. Silabus Pelatihan Tipologi Pihak Pelapor
8. Silabus Pelatihan Identifikasi Risiko TPPT-PP-rev
9. Silabus Pelatihan Pengawasan berbasis risiko TPPT LPP-rev
10. Silabus Pelatihan Internalisasi NRA dan SRA bagi LPP
11. Silabus Pelatihan Pemulihan Aset dari Kejahatan Kehutanan dan LH
12. Silabus Pelatihan Pemulihan Aset dari Kejahatan Transnasional
13. Silabus Pelatihan Penerapan APUPPT bagi Bank Devisa

14. Silabus Pelatihan Audit Kepatuhan bagi Kemenkop

Kemudian dalam rangka mencapai tujuan pelatihan secara efektif, juga telah dikembangkan beberapa media pembelajaran yang sebelumnya telah dilakukan analisis kebutuhan media berbasis teknologi. Media-media tersebut akan digunakan dalam proses pembelajaran.

Media Pembelajaran yang telah selesai dikembangkan meliputi:

1. Hypermedia Rezim APUPPT
2. Hypermedia Penegakan Hukum
3. Hypermedia Pengenalan Pelaporan
4. Hypermedia PMPJ PBJ
5. Kewajiban Pelaporan PBJ
6. Pengenalan dan Registrasi Pelaporan PBJ (perbaikan)

PENGAWASAN INTERNAL

MENJAGA KEUTUHAN INTEGRITAS MARWAH ORGANISASI PPA TK

AMANA H Pasal 76 dan 77 Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPA TK, Inspektorat mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan PPA TK yang dilakukan terhadap kinerja dan keuangan melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.

Pada tanggal 26 sampai dengan 27 Januari 2023, Inspektorat PPA TK menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengawasan Tahun 2023

(Rakorwas) dengan mengundang Kepala PPA TK dan seluruh pimpinan unit kerja eselon I dan II di lingkungan PPA TK.

Kegiatan Rakorwas bertujuan untuk meningkatkan hasil pengawasan intern yang dilakukan oleh Inspektorat dengan melakukan koordinasi dengan seluruh klien pengawasan Inspektorat. Pada Rakorwas tersebut, dilaksanakan juga penandatanganan Kebijakan Pengawasan, Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), dan Piagam Audit oleh Kepala PPA TK dan disaksikan oleh pimpinan eselon I dan eselon II PPA TK.



Inspektorat PPA TK juga telah melaksanakan enam kegiatan pendampingan dan konsultasi terhadap kegiatan unit kerja di lingkungan PPA TK.

Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk upaya Inspektorat PPA TK dalam menjadi mitra strategis unit kerja untuk memperbaiki tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal di lingkungan PPA TK.

DAFTAR KEGIATAN PENGAWASAN INTERNAL

| No. | Jenis Pengawasan | Jumlah LHP |
|---------------------------------------|--------------------|---------------|
| 1. | Audit Kinerja | 5 LHP |
| 2. | Evaluasi | 4 LHP |
| 3. | Pemantauan | 3 LHP |
| 4. | Pengawasan Lainnya | 13 LHP |
| 5. | Reviu | 8 LHP |
| Total LHP s.d. Semester I 2023 | | 33 LHP |

PENGHARGAAN & PENCAPAIAN 2023

| | |
|---|-----|
| PPATK Raih RAN PE Awards 2023 | 130 |
| Penyelenggaraan Satu Data Indonesia | 132 |
| BKN Award 2023 | 136 |
| Predikat AA Sangat Memuaskan | |
| Kearsipan PPATK | 138 |
| PPATK Raih Penghargaan dari BNN | 140 |
| Sinergi PPATK - Ditjen Pajak | |
| Optimalisasi Penegakan Hukum Pajak | 142 |
| Partisipasi dan Prestasi PPATK dalam | |
| Mendukung Ketetuaan ASEAN 2023 | 146 |
| BAZNAS Award 2023 | 148 |

PPATK RAIH RAN PE AWARDS 2023

DARI BNPT PADA PILAR III (KEMITRAAN DAN KERJA SAMA INTERNASIONAL)

BADAN Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menganugerahkan RAN PE Awards Tahun 2023 kepada PPATK pada kategori Berkomitmen pada Pilar III tentang Kemitraan dan Kerja Sama Internasional. RAN PE Award diberikan oleh Kepala BNPT, Komjen Pol. Boy Rafli Amar yang diterima oleh Deputy Bidang Strategi dan Kerja Sama PPATK, Dr. Tuti Wahyuningsih pada 10 Maret 2023 di Jakarta. RAN PE merupakan Rencana Aksi Nasional Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021.

Penghargaan ini diraih oleh PPATK dikarenakan pelaksanaan aksi-aksi dalam RAN PE secara konsisten dan berkontributif oleh PPATK pada Pilar III yang dipandang oleh BNPT sebagai *champion*

stories, diantaranya peran strategis PPATK penyediaan informasi terkait analisis transaksi keuangan dan *platform* sistem pertukaran informasi pendanaan terorisme terpadu antar Kementerian/Lembaga. Kerja sama pertukaran informasi tersebut membawa manfaat pada penanggulangan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Selain itu, PPATK berperan aktif dalam berbagai forum internasional baik bilateral, regional maupun multilateral terkait dengan terorisme dan pendanaan terorisme diantaranya dalam *Counter ISIS Finance Group (CIFG) meeting*, *Financial Intelligence Consultative Group (FICG) of Counter Terrorist Financing*, dan Pertemuan Konsultasi Bilateral Penanggulangan Terorisme antara Indonesia dan Australia.



PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA

PERINGKAT PERTAMA KATEGORI INSTANSI PUSAT

PPATK mencapai peringkat pertama pada kategori Instansi Pusat pada Pemantauan dan Evaluasi Mandiri Perkembangan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) di PPATK Tahun 2022 dengan **skor kematangan sebesar 93,61% (optimum)**.

Pemantauan ini dilaksanakan pada bulan Desember 2022 dalam bentuk penilaian mandiri dan pemenuhan bukti dukung atas

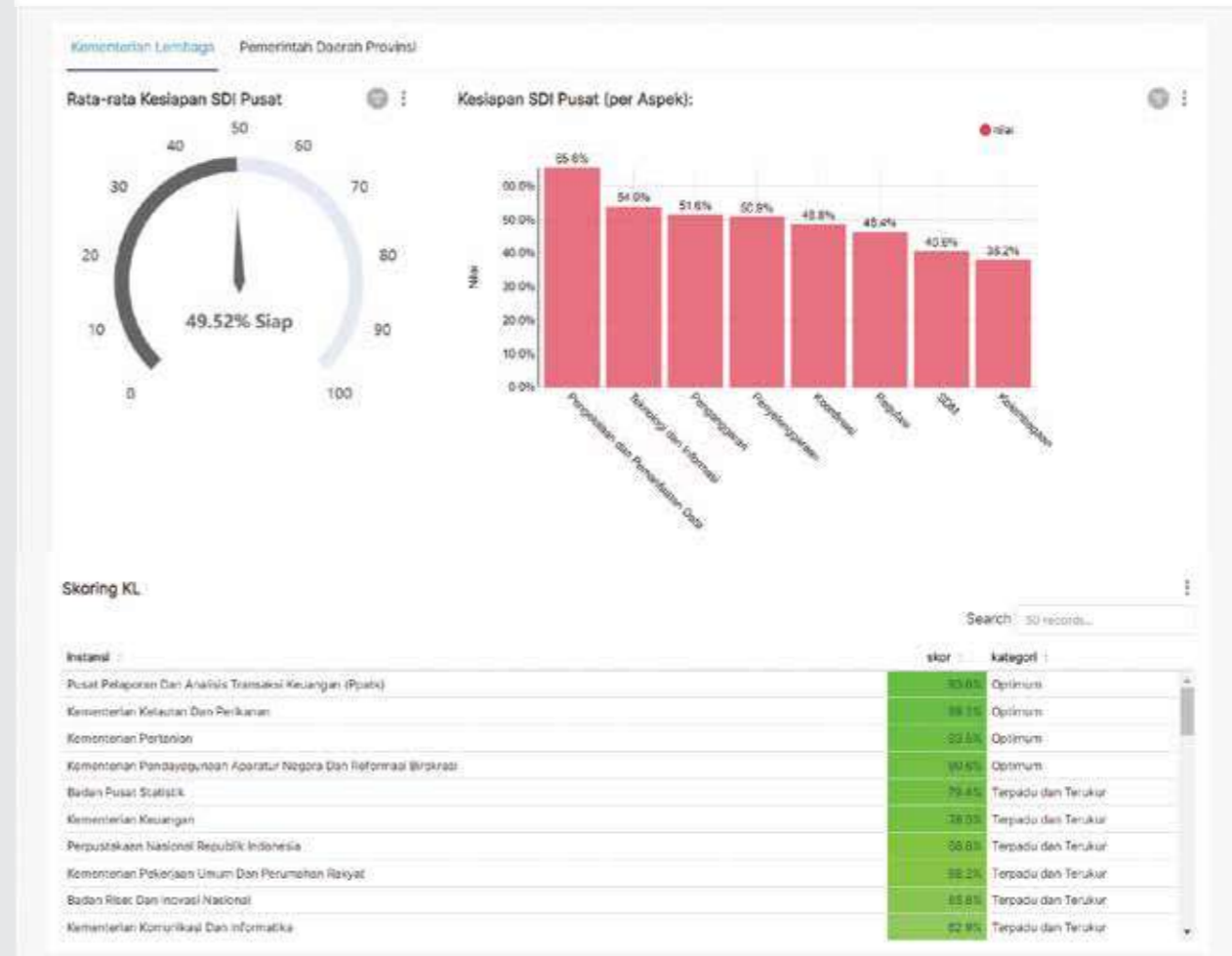
8 aspek penyelenggaraan SDI (Regulasi; Kelembagaan; SDM; Penganggaran; Koordinasi; Pengelolaan dan Pemanfaatan Data; Teknologi dan Informasi; dan Penyelenggaraan). Dari hasil verifikasi dan rekomendasi balikan yang disampaikan oleh Kementerian PPN/ BAPPENAS selaku Sekretariat SDI Tingkat Pusat pada 9 Mei 2023, pemantauan ini diikuti oleh 50 Kementerian/Lembaga (tingkat pusat) dan 28

| No. | Instansi | Skor | Kategori |
|-----|---|-------|---------------------|
| 1. | Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan | 93.6% | Optimum |
| 2. | Kementerian Kelautan dan Perikanan | 89.2% | Optimum |
| 3. | Kementerian Pertanian | 83.5% | Optimum |
| 4. | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | 80.6% | Optimum |
| 5. | Badan Pusat Statistik | 79.4% | Terpadu dan Terukur |
| 6. | Kementerian Keuangan | 78.5% | Terpadu dan Terukur |
| 7. | Perpustakaan Nasional Republik Indonesia | 68.8% | Terpadu dan Terukur |
| 8. | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 68.2% | Terpadu dan Terukur |
| 9. | Badan Riset dan Inovasi Nasional | 65.8% | Terpadu dan Terukur |
| 10. | Kementerian Komunikasi dan Informatika | 62.9% | Terpadu dan Terukur |

Catatan: Rata-rata skor nasional pada Instansi Pusat sebesar 49,52%.

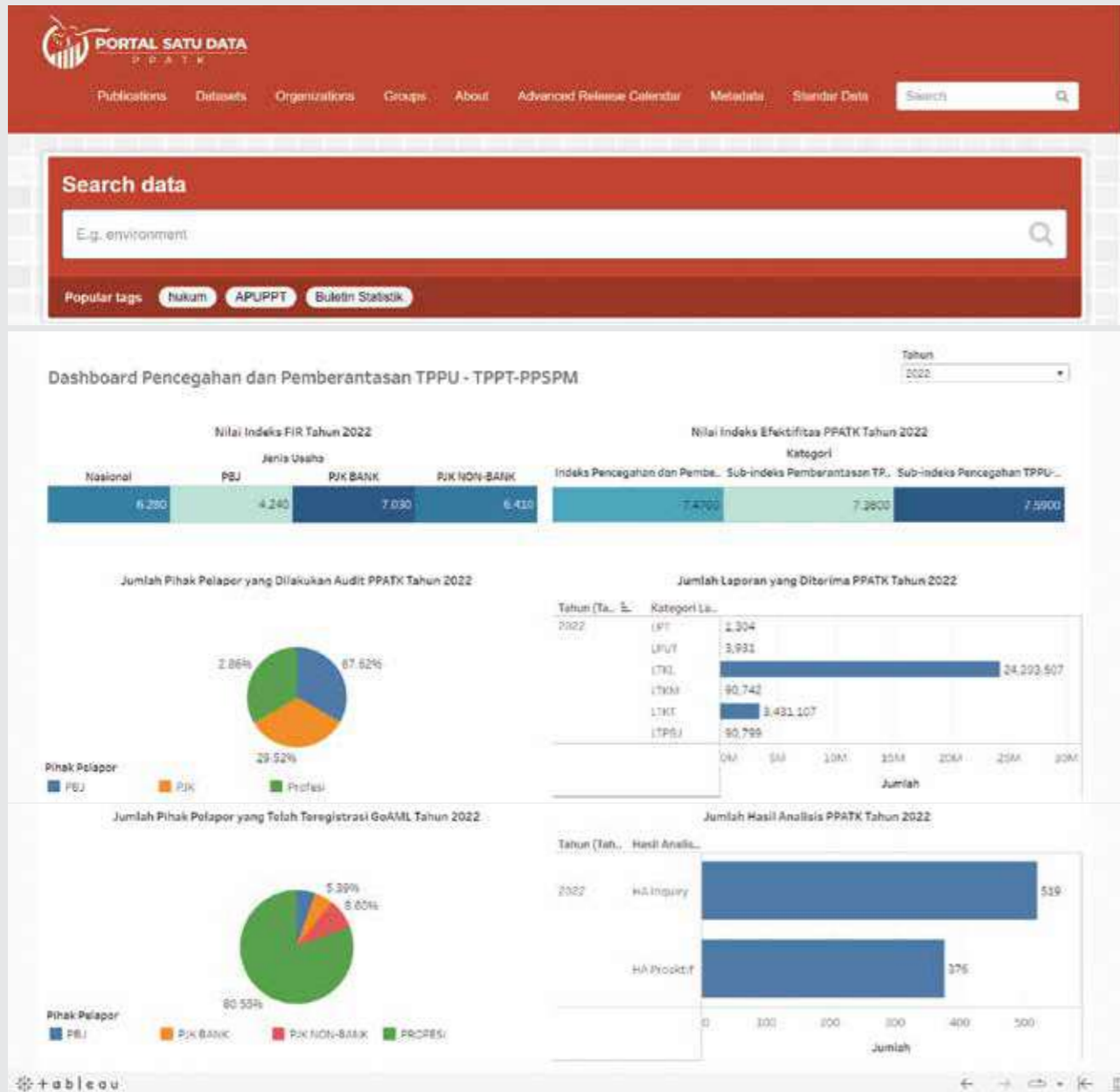
Pemerintah Daerah Provinsi (tingkat daerah). skor kematangan tertinggi sebagai berikut: Adapun 10 Instansi Pusat yang memperoleh

Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan SDI tingkat pusat dan daerah yang diikuti oleh 50 Kementerian Lembaga dan 28 Pemerintah Daerah Provinsi



Dashboard Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan SDI Kementerian/ Lembaga

(Sumber: Portal SDI BAPPENAS <https://data.go.id>)



Tampilan Portal Satu Data PPATK
(Sumber : <https://satudata.ppatk.go.id>)

Portal Satu Data PPATK adalah media bagi pakai data PPATK yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang dikembangkan dan dikelola oleh PPATK untuk mendukung kebijakan Satu Data Indonesia.

Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah untuk diakses dan dibagi pakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, kaidah interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.

Portal Satu Data PPATK merupakan bentuk implementasi dari Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Satu Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagai perwujudan kebijakan Satu Data Indonesia.

Portal Satu Data PPATK dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek

interoperabilitas data dengan Portal Satu Data Indonesia. Proses integrasi Portal Satu Data PPATK dan Portal Satu Data Indonesia dilakukan melalui mekanisme API Web Service.

Data pada Portal Satu Data PPATK yang telah diintegrasikan dengan Portal Satu Data Indonesia mengacu kepada peraturan perundangundangan mengenai keterbukaan informasi publik dan Peraturan PPATK mengenai klasifikasi informasi di lingkungan PPATK.

BKN AWARD 2023

KATEGORI UTAMA IMPLEMENTASI NSPK MANAJEMEN ASN TERBAIK

BADAN Kepegawaian Negara (BKN) memberikan penghargaan BKN Award Tahun 2023 pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian 2023 yang diselenggarakan di Kota Bandung tanggal 30 Mei 2023. Acara ini merupakan tahun kesembilan sejak BKN Award diluncurkan pada tahun 2015 dengan tujuan untuk

memacu kinerja K/L/D dalam melaksanakan implementasi manajemen ASN.

Kategori penghargaan Instansi Pemerintah yang dinilai meliputi Instansi Pusat, yakni terdiri dari Kementerian dan Lembaga Negara/ Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK); dan Instansi Daerah yang terdiri dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota,

Pemerintah Kabupaten, serta Pemerintah Kabupaten/Kota.

Adapun penilaian BKN Award 2023 dibagi menjadi 3 kategori, yaitu: **Pertama**, kategori utama berupa Implementasi Manajemen ASN Terbaik. **Kedua**, kategori elemen implementasi manajemen ASN dan pemanfaatan sistem informasi yang mencakup Perencanaan Kebutuhan dan Mutasi Kepegawaian; Pengembangan Kompetensi; Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja; Penerapan Pemanfaatan Data – Sistem

Informasi dan CAT. **Ketiga**, kategori *special mention* yakni Komitmen Peningkatan Pelayanan Kepegawaian BKN.

PPATK berhasil meraih penghargaan peringkat ke-4 pada kategori Perencanaan Kebutuhan dan Mutasi Kepegawaian untuk Instansi Pemerintah Non-Kementerian tipe kecil, peringkat ke-4 pada kategori Penerapan Pemanfaatan Data – Sistem Informasi dan CAT untuk Instansi Pemerintah Non-Kementerian tipe kecil, dan juga Kategori Utama Implementasi NSPK Manajemen ASN Terbaik.



PREDIKAT AA

“SANGAT MEMUASKAN” KEARSIPAN PPAATK

PADA Tanggal 22 Mei 2023, bertepatan dengan puncak peringatan Hari Kearsipan ke-52 tahun 2023 di Banyuwangi, Jawa Timur, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar

Annas memberikan penghargaan anugerah kearsipan.

Berdasarkan Pengumuman Nomor : AK.01.02/25/2022 tanggal 7 Desember 2022 tentang Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun

2022 serta Keputusan Kepala ANRI Nomor 421 Tahun 2022, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mendapatkan nilai **93,96 (AA “Sangat Memuaskan”)** dengan kategori Lembaga Tinggi Negara, Lembaga Setingkat Kementerian, Dan Lembaga Non Struktural.

Sebagai informasi, jumlah institusi yang dilakukan pengawasan kearsipan tingkat

pusat tahun 2022 terdiri dari 79 Kementerian/Lembaga, 34 Provinsi dan 422 Kabupaten/Kota yang secara keseluruhan berjumlah 548 Instansi.



PPATK RAIH PENGHARGAAN DARI BNN

PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menerima Penghargaan Pencegahan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotik yang di serahkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional(BNN) RI Komisariss Jenderal Polisi Petrus Reinhard Golose, kepada Kepala PPATK, Dr. Ivan Yustiavandana.

Penghargaan ini diserahkan pada Malam Puncak peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2023 yang di selenggarakan oleh BNN RI bersama dengan seluruh elemen bangsa serta perwakilan negara-negara sahabat di Garuda Wisnu Kencana, Badung Bali, pada Senin, 26 Juni 2023. Pada tahun 2023, HANI mengusung tema internasional : *"People first: stop stigma and discrimination, strengthen prevention"*, sedangkan tema nasional HANI adalah : *"Akselerasi War On Drugs Menuju Indonesia Bersinar"*.

Kepala PPATK mengapresiasi atas capaian PPATK karena upaya pencegahan pencucian uang melalui tindak pidana asal Narkotika adalah tugas yang selalu ditunaikan setiap saat.

"Apalagi Narkotika adalah tindak pidana asal pencucian uang nomor satu paling rentan dilakukan oleh pelakunya, sebagaimana hasil Penilaian Risiko Nasional Pencucian Uang tahun 2021," ungkapnya.

Peringatan HANI dilakukan sebagai bentuk keprihatinan dunia terhadap korban penyalahgunaan narkotika sekaligus wujud perlawanan terhadap salah satu kejahatan

luar biasa (*extraordinary crime*) yang menjadi tantangan negara-negara di seluruh dunia. Peringatan HANI menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran akan masalah utama yang ditimbulkan oleh narkotika, yaitu *loss generation*. (MT)



SINERGI PPAK - DITJEN PAJAK

OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM PAJAK

DEPUTI Strategi dan Kerja Sama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Tuti Wahyuningsih memberi pengarahan dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penegakan Hukum Pajak Tahun 2023 bertempat di Aula Cakti Buddi Bhakti, Gerung Mar'ie Muhammad Direktorat Jenderal Pajak. Acara yang diselenggarakan secara hybrid ini dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo dan dihadiri oleh sejumlah mitra strategis penegak hukum serta perwakilan pegawai Direktorat Jenderal Pajak dari seluruh Indonesia.

"Kerja Sama antara PPAK dengan Direktorat Jenderal Pajak sudah terjalin sejak lama" ungkap Tuti. Lebih lanjut Tuti menyampaikan bentuk kerja sama tersebut antara lain melalui pertukaran informasi, perumusan produk hukum dan penanganan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Perpajakan.





Deputi Wanita Pertama PPATK ini menjelaskan bahwa upaya untuk pemaksimalan pemulihan aset merupakan salah satu upaya yang tak kalah penting, yakni dengan menggabungkan penyidikan Tindak Pidana Perpajakan dengan TPPU, karena ada beberapa bentuk harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah tersamarkan dari hasil usaha dan hasil investasi sah yang sulit untuk dijangkau.

“Dengan adanya TPPU, maka objek harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah tersamarkan tersebut adalah perwujudan dari perbuatan TPPU dan termasuk sebagai objek yang dapat disita atau dirampas dalam TPPU,” jelasnya.

Dalam kesempatan ini, wanita yang pernah menjadi Konsul Jenderal RI *Vancouver*



ini menerima secara simbolis penghargaan bagi PPATK sebagai Mitra Kerja Terbaik terkait Sinergi dalam Meningkatkan Kinerja Penegakan Hukum Pidana Pajak Tahun 2022.

PENGHARGAAN UNTUK PUSDIKLAT APUPPT

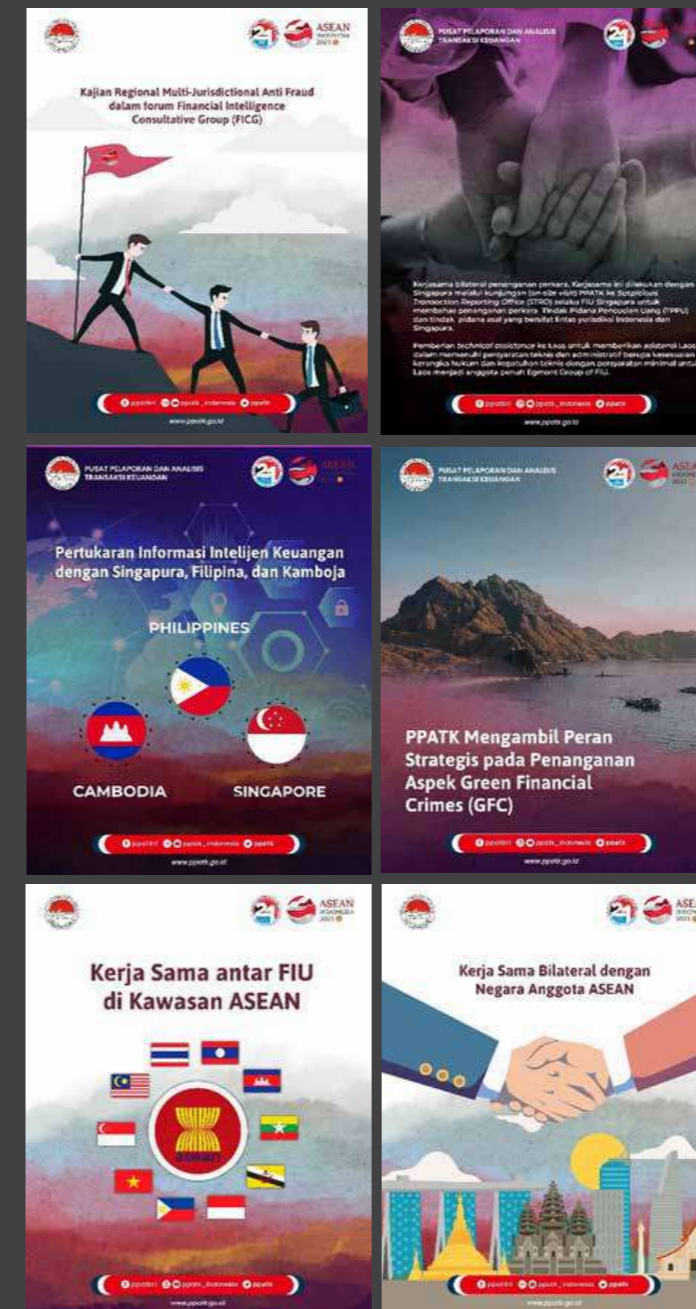
Dalam Rakornas ini, PPATK juga mendapatkan penghargaan sebagai Mitra Kerja Pengembangan Sumber Daya Manusia Terbaik Tahun 2022 yang diterima oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme PPATK (Pusdiklat APUPPT), Akhyar Effendi. (DF/MT)



PARTISIPASI DAN PRESTASI PPAATK DALAM MENDUKUNG KEKETUAAN ASEAN 2023

DALAM rangka mendukung suksesnya pelaksanaan Keketuaan ASEAN 2023, PPAATK melalui Kelompok Hubungan Masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Strategi Komunikasi dan Konten Tematik Keketuaan ASEAN 2023. Dalam hal ini, PPAATK berpartisipasi dalam diseminasi dan penyusunan konten terkait peran PPAATK

dengan negara-negara ASEAN. Tujuannya agar amplifikasi pesan terkait Keketuaan ASEAN Indonesia tahun ini dapat disebarluaskan secara masif serta dapat dipahami dengan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, sehingga berdampak pada dukungan masyarakat terkait kegiatan KTT ASEAN di Indonesia.



Selain itu, dalam kegiatan ini juga dilaksanakan Kompetisi Pembuatan Konten Kreatif oleh seluruh peserta Bimbingan Teknis yang terdiri dari Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia. PPAATK turut berpartisipasi dalam kompetisi ini dengan membuat video vlog terkait pariwisata di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat sebagai tuan rumah pelaksanaan KTT ASEAN, yakni Gua Batu Cermin. Hasilnya, PPAATK mampu meraih Juara II dari ribuan peserta yang berpartisipasi. Berikut daftar pemenang dari kompetisi pembuatan konten kreatif Keketuaan ASEAN 2023 :

- Juara I oleh Kementerian Badan Usahan Milik Negara
- **Juara II oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan**
- Juara III oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Juara IV oleh Kementerian Agama

BAZNAS AWARD 2023

PPATK SEBAGAI
LEMBAGA PENDUKUNG
EKOSISTEM ZAKAT

PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan memperoleh penghargaan pada Baznas Award 2023 kategori lembaga pendukung ekosistem zakat sejahteraan umat pada Selasa 21 Maret 2023 yang diselenggarakan di Hotel Sahid Jakarta.

Penghargaan ini diperoleh PPATK sebagai apresiasi terhadap kinerja organisasi pengelola zakat yang turut mendukung dan mendorong kebangkitan zakat di Indonesia.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berharap PPATK sebagai lembaga pendukung ekosistem zakat dapat terus mendukung kegiatan Baznas selaku pengumpul zakat sehingga perolehan zakat di Indonesia dapat terus meningkat.



GLOSARIUM

| | |
|-----------------------|--|
| AI | <i>Artificial Intelligence</i> - Kecerdasan buatan -- kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah atau bisa disebut juga intelegensi artifisial sebagai kecerdasan entitas ilmiah |
| AML SMART Competition | Lomba Cerdas Cermat bertemakan seputar Anti Pencucian uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme tingkat Sekolah Menengah Atas yang diselenggarakan PPATK |
| AML-CTF Office Battle | Ajang kompetisi sebagai wadah bagi pihak pelapor untuk menambah pengetahuan, meningkatkan minat pihak pelapor dalam pemahaman dan penguatan sistem terkait rezim APUPPT yang ditujukan bagi kalangan pihak pelapor di Indonesia |
| Analisis | Penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya |
| APUPPT | Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme |
| Asset Recovery | Pemulihan aset, juga dikenal sebagai investasi atau pemulihan sumber daya, adalah proses memaksimalkan nilai aset yang tidak digunakan atau aset akhir masa pakainya melalui penggunaan kembali atau divestasi yang efektif, atau pengembalian aset (harta) kekayaan negara yang telah dikorupsi. Para penegak hukum |
| Audit Trail | Jejak Audit, catatan kronologis yang relevan dengan keamanan, kumpulan catatan, dan/atau tujuan dan sumber catatan yang memberikan bukti dokumenter tentang urutan aktivitas yang memengaruhi operasi, prosedur, peristiwa, atau perangkat tertentu setiap saat. |
| Bawaslu | Badan Pengawas Pemilu |
| BAZNAS | Badan Amil Zakat Nasional |
| BKN | Badan Kepegawaian Negara |
| BMN | Barang Milik Negara |
| BNN | Badan Narkotika Nasional |
| BNPT | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme |
| CIFG | Counter ISIS Finance Group |
| Demokrasi | Bentuk pemerintahan yang keputusan-keputusan penting, baik secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari masyarakat dewasa. |

| | |
|-----------------------|---|
| DIPA | Daftar Isian Pelaksana Anggaran adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dan di sahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendaharawan Umum |
| DPK | Direktorat Pengawasan Kepatuhan PPATK |
| DTTOT | Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris |
| E-wallet | Dompet elektronik memungkinkan para pengguna untuk melakukan transaksi jual-beli elektronik secara cepat dan aman. |
| FATF | <i>Financial Action Task Force</i> -- Gugus Tugas Aksi Keuangan, juga dikenal dengan nama Prancisnya, <i>Groupe d'action financière</i> , adalah organisasi antar pemerintah yang didirikan pada tahun 1989 atas prakarsa G7 untuk mengembangkan kebijakan memerangi pencucian uang dan mempertahankan kepentingan tertentu |
| FGD | Focus Group Discussion -- metode pengumpulan data kualitatif yang melibatkan sekelompok orang dengan pengalaman atau perspektif yang sama terhadap topik tertentu, untuk berdiskusi dan berbagi pandangan mereka |
| FICG | Financial Intelligence Consutative Group |
| FIR on ML/TF | Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorism Financing -- indeks penilaian integritas Pihak Pelapor terkait kinerja pelaporan kepada PPATK dalam rangka penerapan program Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme |
| GoAML | Aplikasi pelaporan Go Anti Money Laundering (GoAML) yang diluncurkan oleh PPATK sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) |
| Green Financial Crime | Aspek Financial yang Mengakari Kejahatan lingkungan yang mencakup berbagai kegiatan mulai dari eksploitasi sumber daya alam, perdagangan sumber mineral, kehutanan hingga perdagangan limbah secara ilegal |
| Hackathon | Kegiatan kompetisi pemrograman yang berlangsung untuk beberapa jam hingga beberapa hari |
| HANI | Hari Anti Narkotika Internasional |



GLOSARIUM

| | |
|----------------|---|
| IPA | Indeks Pengelolaan Aset |
| Joint Audit | Audit bersama -- audit pada badan hukum oleh dua atau lebih auditor untuk menghasilkan satu laporan audit, sehingga berbagi tanggung jawab untuk audit. Audit gabungan yang khas memiliki perencanaan audit yang dilakukan bersama dan pekerjaan lapangan dialokasikan kepada auditor |
| KPU | Komisi Pemilihan Umum |
| KSP | Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam |
| KUPVA | Kelompok Usaha Penukaran Valuta Asing |
| LPP | Lembaga Pengawas Pengatur |
| LTKL | Laporan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri |
| LTKM | Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan |
| LTKT | laporan transaksi keuangan tunai (transaksi keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam) yang disampaikan penyedia jasa keuangan |
| Money Politic | Politik Uang - sebuah upaya memengaruhi pilihan pemilih (voters) atau penyelenggara pemilu dengan imbalan materi atau yang lainnya. Dari pemahaman tersebut, politik uang adalah salah satu bentuk suap |
| MoU | Memorandum of Understanding - Nota kesepahaman -- sebuah dokumen legal yang menjelaskan persetujuan antara dua atau lebih belah pihak |
| Narkotika | zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang |
| NKRI | Negara Kesatuan Republik Indonesia |
| OJK | Otoritas Jasa Keuangan |
| PBJP | Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain dan Profesi |
| Pemilu | Pemilihan Umum |
| Pencucian uang | suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/ dana atau Harta Kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau Harta Kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal |

| | |
|----------------------------|---|
| Pialang | individu atau perusahaan yang diberi wewenang untuk membeli dan menjual saham atau bentuk investasi lainnya |
| Pilkada | Pemilihan Kepala Daerah |
| PJK | Penyedia Jasa Keuangan |
| PMPJ | Prinsip Mengenali Pengguna Jasa |
| PNBP | Penerimaan Negara Bukan Pajak |
| PPATK | Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan |
| PPATK Mengajar | Kegiatan Edukasi seputar Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di tingkat pelajar |
| PPSPM | Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal |
| PTD BB | Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank |
| Public Private Partnership | Kemitraan pemerintah-swasta, adalah bentuk perjanjian jangka panjang antara pemerintah, baik pusat ataupun daerah, dengan mitra swasta. |
| SIDAKAM | Sistem Informasi Data Kampanye |
| Stakeholders | Pemangku kepentingan atau pemegang kepentingan -- segenap pihak yang terkait dengan isu dan permasalahan yang sedang diangkat |
| Terorisme | penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan (terutama tujuan politik); praktik tindakan teror |
| TPPO | Tindak Pidana Perdagangan Orang |
| TPPT | Tindak Pidana Pendanaan Terorisme |
| TPPU | Tindak Pidana Pencucian Uang |
| Valuta Asing | Mata uang yang digunakan sebagai alat pembayaran sah dalam perdagangan berskala internasional |





Hak Cipta © 2023
oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari penulis atau penerbit.



LAPORAN SEMESTER 1

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

2023

Jl. Ir. H. Juanda No. 35 Jakarta Pusat

www.ppatk.go.id